

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2018

PENULIS:

**NI LUH ARJANI
NI MADE WIASTI**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR
BEKERJASAMA DENGAN
PUSAT STUDI WANITA DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIVERSITAS UDAYANA**

SAMBUTAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Denpasar



Om Swastyastu,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan

sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2017, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juli 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198603 2 025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Manfaat	5
1.4 Jenis dan Sumber Data	6
1.5 Analisis Data	6
BAB II DEFINISI BEBERAPA KONSEP	8
2.1 Statistik Gender	8
2.2 Konsep Gender	9
2.3 Kesetaraan Gender (KG).....	10
2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)	11
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	14
3.1 Sejarah Ringkas Kota Denpasar	14
3.2 Penjelasan Lambang	15
3.3 Visi dan Misi	17
2.3.1 Visi	17
2.3.2 Misi	17
3.4 Letak Geografis	17
3.5 Kondisi Demografi	20
3.5.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelami	20
3.5.2 Penduduk menurut Status Perkawinan	22
3.5.3. Indek Pembangunan Gender (IPG)	23
BAB IV PENDIDIKAN	
4.1 APM Pada Jenjang Pendidikan	27
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	29
4.3 Jumlah Siswa	31
4.4 Guru yang Tersertifikasi	33
4.4.1 Jumlah Guru SD Yang Tersertifikasi	33
4.4.2 Jumlah Guru SMP Yang Tersertifikasi	34
4.4.3 Jumlah Guru SMA dan SMK Yang Tersertifikasi	35
4.5 Jumlah Sekolah	37

BAB V KESEHATAN	39
5.1 Pemberian ASI Eksklusif	40
5.2 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	42
5.3 Status Gizi Balita	44
5.4 Peserta Keluarga Berencana (KB)	45
5.5 Jumlah Tenaga Kesehatan	46
5.5.1 Jumlah Dokter Umum	47
5.5.2 Dokter Spesialis	48
5.5.3 Dokter Gigi	50
BAB VI EKONOMI	53
6.1 Kegiatan Utama Penduduk	53
6.2 Juru Parkir	55
6.3 Petugas Kebersihan	56
6.4 Tenaga Pertamanan	58
6.5 Pemilik Salon	59
6.6 Tenaga Kerja di Bidang Usaha Fitnes	62
6.7 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata	63
6.8 Pemilik Hotel	65
6.9 Tenaga Kerja Restoran/RM	67
BAB VII SEKTOR PUBLIK	70
7.1 Legislatif	72
7.1 Keanggotaan DPRD	72
7.2 Pengurus Partai Politik	75
7.3 Anggota Panitia Pemilihan	73
7.4 Anggota Panitia Pemungutan Suara	80
7.5 Anggota KPU	82
7.6 Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan	84
7.7 Pejabat Berdasarkan Eselon	86
7.8 Yudikatif	88
7.8.1 Jaksa	89
7.8.2 Hakim	90
7.8.3 Notaris	91
7.8.4 Advokat	92
7.8.5 Polisi	93

BAB VIII LAIN-LAIN	96
8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan.....	96
8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	100
8.3 Penduduk Lanjut Usia (Lansia)	104
BAB IX PENUTUP	107
9.1 Simpulan.....	107
9.2 Rekomendasi.....	108
Daftar Pustaka	109

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1	Jumlah Desa, Jumlah Banjar dan Jumlah Rumahtangga Di Kota Denpasar Tahun 2017	18
Tabel : 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Di Kota Denpasar 2016 dan 2017	21
Tabel : 3.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2017	23
Tabel : 4.1	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2015/2016 dan 2016/2017	27
Tabel : 4.2	APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar	29
Tabel : 4.3	Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2015/2016-2016/2017	31
Tabel : 4.4	Jumlah Guru SD yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016- 2016/2017	34
Tabel : 4.5	Jumlah Guru SMP yang sudah Sertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	35
Tabel : 4.6	Jumlah Guru SMA dan SMK yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	36
Tabel : 4.7	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2015/2016 dan 2016/2017	37
Tabel : 5.1	Persentase Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	41
Tabel : 5.2	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Menurut Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2017	43
Tabel : 5.3	Cakupan Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar Tahun 2017	44
Tabel : 5.4	Jumlah Peserta KB di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	46
Tabel : 5.5	Jumlah Dokter Umum yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017	48
Tabel : 5.6	Jumlah Dokter Spesialis yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	49

Tabel : 5.7	Jumlah Dokter Gigi yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017	50
Tabel : 6.1	Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelataran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	56
Tabel : 6.2	Jumlah Tenaga Kebersihan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017	57
Tabel : 6.3	Jumlah Tenaga Pertamanan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	59
Tabel : 6.4	Jumlah Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	60
Tabel : 6.5	Tenaga Kerja yang di Serap pada Bidang Usaha Fitnes Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	62
Tabel : 6.6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2015 dan 2017	64
Tabel : 6.7	Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin tahun 2016 dan 2017	66
Tabel : 6.8	Tenaga Kerja yang terserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin	68
Tabel : 7.1	Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2014 – 2019	74
Tabel : 7.2	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2014-2019	79
Tabel : 7.3	Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	81
Tabel : 7.4	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan unit Kerja di Kota Denpasar, 2017	85
Tabel : 7.5	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	86
Tabel : 7.6	Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	87

Tabel : 8.1	Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017	98
Tabel : 8.2	Ciri – Ciri dan Pelaku Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar. 2016 dan 2017	99
Tabel : 8.3	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Telah di bina dan di Pulangkan di Kota Denpasar, Tahun 2016 dan 2017	104
Tabel : 8.4	Jumlah Lansia menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 3.1	Persentase Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2017	19
Gambar : 3.2	Perkembangan IPG Kota Denpasar dan Bali Tahun 2014 dan 2015	24
Gambar : 4.1	Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017	28
Gambar : 4.2	Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017	30
Gambar : 4.3	Persentase Siswa SD- SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017	32
Grafik : 4.4	Persentase Guru SD, SMP, SMA dan SMK yang Telah Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin, 2017	37
Gambar : 5.1	Persentase Dokter menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	51
Gambar : 6.1	Persentase Tenaga Kebersihan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017	58
Gambar : 6.2	Persentase Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	61
Gambar : 6.3	Persentase Tenaga Kerja yang di Serap pada Bidang Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2011 dan 2012	63
Gambar : 6.4	Persentase Tenaga kerja Laki-laki dan Perempuan yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar Th.2015 dan 2017	65
Gambar : 6.5	Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Th. 2017	67
Gambar : 6.6	Persentase Tenaga Kerja yang terserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2017	69

Gambar : 7.1	Persentase Keanggotaan DPRD menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2014 – 2019	75
Gambar : 7.2	Persentase Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	78
Gambar : 7.3	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2014- 2019	80
Gambar : 7.4	Persentase Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	82
Gambar : 7.5	Persentase Anggota KPU Kota Denpasar Periode Tahun 2013-2018	83
Gambar : 7.6	Persentase Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2017	86
Gambar : 7.7	Persentase Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	88
Gambar : 7.7	Persentase Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	89
Gambar : 7.9	Persentase Hakim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017	90
Gambar :7.10	Persentase Notaris menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	91
Gambar :7.11	Persentase Advokat menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	93
Gambar : 7.12	Persentase Polisi menurut jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	94
Gambar : 7.13	Persentase Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017	94
Gambar : 8.1	Persentase Korban kekerasan menurut Jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017	100
Gambar : 8.2	Persentase Gepeng menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2016 dan 2017	103
Gambar : 8.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2017	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kondisi yang damai, aman dan sejahtera baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kondisi yang demikian ini juga menjadi tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yakni terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP Nasional 2005-2025) disebutkan bahwa salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran tercapainya Indonesia maju, mandiri, dan adil adalah tercapainya sasaran berupa terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.

Meskipun secara normatif telah tersirat dan tersurat tujuan hidup adil dan sejahtera, namun sampai saat ini persoalan gender dan pemberdayaan perempuan masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender yang masih terjadi pada berbagai indikator pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius. Lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Dvelopment Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam *Millenium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September tahun

2000. MDGs telah menyepakati 8 goals dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Salah satu dari delapan goals tersebut yakni goals ke tiga adalah Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hasil evaluasi dari target MDGs tahun 2015 kesetaraan gender ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, maka target ini dilanjutkan ke *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target capaian di tahun 2030. Ini berarti bahwa setiap negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan di tahun 2030. Ini menunjukkan bahwa permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi tantangan global bagi semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan sudah lebih dari tiga dasa warsa. Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender (KPP, 2005:4).

Berbagai strategi dan pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender di Indonesia. Secara resmi penanganan masalah perempuan dan gender dilakukan sejak didirikannya lembaga khusus pemberdayaan perempuan pada tahun 1978 yang saat itu bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui lembaga Negara ini pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan Perempuan dan gender yang banyak terjadi di masyarakat.

Kuatnya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sudah tampak sejak pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. III melalui Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957. Payung hukum ini menggariskan pengupahan

yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pada tahun 1984 Pemerintah RI juga telah meratifikasi *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1984 yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, *Gender and Development (GAD)* dan *Gender Mainstreaming (GM)*. Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Instruksi Presiden di atas kemudian mendapat respon yang positif dari jajaran pemerintahan di daerah, termasuk di Provinsi Bali khususnya pemerintah Kota Denpasar. Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam mendukung kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan perempuan, pada tahun 2001 di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan peranan perempuan, yaitu Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP), yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II. Sementara itu, di kota telah dibentuk pula lembaga serupa setingkat eselon dua. Saat ini, lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi Bali adalah Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), dan untuk di Kota Denpasar urusan pemberdayaan perempuan ditangani oleh Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) yang sejak awal tahun 2017 telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB). Dengan adanya lembaga khusus yang menangani persoalan gender, perempuan, dan anak maka akan lebih mudah dan lebih terfokus dalam mengaplikasikan program-program dan strategi pengarusutamaan gender, serta upaya-upaya lain dalam mengatasi persoalan gender dan perempuan dan anak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali serta Kabupaten/kota, sejak tahun 2001 mulai mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dalam bentuk buku Profil Statistik Gender, dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk

secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Selain itu, eksistensi buku yang mempublikasikan data gender secara lengkap menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan profil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.

1.2 Tujuan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa keberadaan buku statistik gender memegang peranan penting dalam menyusun perencanaan yang responsif gender. Oleh karena itu tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Statistik Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud. Dengan demikian diharapkan target SDGs bisa tercapai pada tahun 2030.

1.3. Manfaat

Selama ini seringkali penyusunan perencanaan pembangunan tanpa dilandasi data-data yang valid, dan kadangkala tanpa dasar data.

Hal ini dilakukan oleh para perencana atau penyusun program karena tidak tersedianya data yang memadai. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan program yang dilakukan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini menjadi penting karena akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dapat cepat terwujud.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan buku statistik gender ini, diperlukan data sekunder maupun primer. Jenis data ada berbagai macam, diantaranya adalah data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosialis, Dinas Kebudayaan dan lain-lain.

1.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar data yang ada dalam

buku statistik gender ini adalah menampilkan data kuantitatif/ data angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber. Data ini diaalisis secara mendalam dan selanjutnya akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat. Namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut sehingga apa yang ditafsirkan bisa mendapatkan jawaban yang jelas dan nyata.

BAB II

DEFINISI BEBERAPA KONSEP

Definisi konsep yang dipakai dalam suatu karya tulis memegang peranan penting, terutama untuk memperoleh persamaan persepsi. Oleh karena itu sebelum sampai pada fokus pembahasan Statistik Gender Kota Denpasar terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa konsep yang terkait dengan penyusunan buku statistik gender ini. Adapun konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

2.1 Statistik Gender

Untuk bisa mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara cepat dan tepat maka keberadaan data statistic gender menjadi sangat penting. Statistik Gender yang dimaksudkan dalam hal ini adalah statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki disemua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender merupakan dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi mereka berubah atau tidak. Dengan cara ini, statistik gender

meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan untuk adanya perubahan. Statistik gender juga diperlukan untuk penelitian untuk mendukung pengembangan dan pengujian penjelasan dan teori-teori untuk memahami lebih baik bagaimana gender beroperasi di masyarakat. Semua manfaat ini membentuk dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Selain itu, statistik gender diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengembangan kebijakan (<https://www.kemenpppa.go.id/lib>)

2.2 Konsep Gender

Sejak hampir tiga dasa warsa istilah gender di Indonesia mulai diperbincangkan, sebelumnya istilah yang terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah istilah kemitrasejajaran. Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan, namun selama ini masih banyak yang mengartikan gender itu sama dengan perempuan. Istilah gender sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi istilah ini sudah ada sejak mulai munculnya adam dan hawa di dunia ini, namun demikian sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang istilah tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penting dijelaskan definisi dari konsep gender agar para pembaca dapat memahaminya. Istilah gender sebenarnya berasal dari bahasa asing (inggris), yaitu *gender*. Dalam kamus bahasa Inggris, gender diartikan sebagai jenis kelamin. Karena diadopsi dari bahasa Inggris, dalam kamus bahasa Indonesia, gender sampai kini juga masih diartikan sebagai jenis kelamin/seks (Depdikbud, 2001:353).

Pada dasarnya secara konseptual, istilah seks berbeda dengan gender. Istilah gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan konstruksi budaya atau buatan masyarakat. Karena merupakan buatan manusia, maka gender itu akan mempunyai sifat antara lain: berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai perkembangan jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan.

Berbeda halnya dengan **Seks** atau jenis kelamin. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Setiap manusia yang lahir pasti mempunyai jenis kelamin, kalau dia lahir laki-laki maka ia akan dilengkapi dengan penis dan testis, sedangkan kalau ia lahir perempuan maka akan dilengkapi dengan vagina. Jenis kelamin ini merupakan anugrah Tuhan sehingga tidak bisa dipertukarkan kepemilikannya dan bersifat abadi dan kodrati, universal dan statis. Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda maka mereka juga mempunyai fungsi kodrati yang berbeda. Kalau perempuan karena ia memiliki alat reproduksi berupa rahim dan sel telur maka ia mempunyai fungsi: menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dengan ASI dan menopause (5 M). Sementara laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi sehingga secara kodrati mempunyai fungsi untuk membuahi sel telur perempuan.

2.3 Kesetaraan Gender (KG)

Seperti diketahui bahwa Kesetaraan Gender (KG) merupakan visi dari pembangunan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu kesetaraan dan keadilan gender (KKG) menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan KKG, namun sampai saat ini masih banyak terjadi ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender di masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender di masyarakat adalah marginalisasi gender, subordinasi gender, diskriminasi gender, kekerasan, dan beban berat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain karena adanya ideologi gender yang berkembang di masyarakat yang meletakkan peran perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik yang kemudian diikuti adanya pelebelan terhadap laki-laki dan perempuan seperti laki-laki kuat, perkasa dan lain-lain, sementara perempuan lemah, lembut, tidak rasional dan lain-lain.

Budaya patriarkhi yang cenderung merugikan perempuan, karena perempuan diletakkan pada posisi inferior sementara laki-laki

superior. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Faktor geografis dan ekonomi juga bisa mempengaruhi munculnya ketimpangan gender di bidang pendidikan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga Pemerintah Indonesia mengusahakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti dinyatakan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Kesetaraan Gender (KG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung satu konsep, yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Angka 1.3 dan 4 Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.

2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara diambil satu strategi pengarusutamaan gender. Istilah Pengarusutamaan Gender (PUG) ini mulai diwacanakan pada konferensi Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing tahun 1995, istilah "*Gender Mainstreaming*" (GM) tercantum di "*Beijing Platform of Action*". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi itu secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan GM ini di negara/tempat masing-masing. Di Indonesia jauh sebelum strategi GM ini diwacanakan, upaya untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan. Namun secara normatif baru dituangkan dalam GBHN sejak tahun 1978.

Meskipun sudah lebih dari tiga dasa warsa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada beberapa aspek pembangunan di masyarakat kita masih tetap terjadi seperti halnya di bidang pendidikan. Untuk mencapai kesetaraan gender (KG), maka pemerintah Indonesia melalui GBHN tahun 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun begitu usaha untuk mencapai KG ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh perempuan. Oleh karena itu akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, desa dan sebagainya. Strategi tersebut dikenal dengan istilah “Pengarusutamaan Gender” (*Gender Mainstreaming*). Strategi ini dicetuskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000.

Secara operasional, pengarusutamaan gender (PUG) diartikan sebagai suatu strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Jadi secara singkat PUG merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu komponen kunci bagi keberhasilan PUG adalah kemampuan para perencana atau penentu kebijakan menyusun atau merumuskan kebijakan yang responsif gender dalam artian dalam menyusun perencanaan/ program/ kegiatan, mampu mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan strategi

pengarusutamaan gender ini, program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitiv atau responsif gender. Hal ini pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

BAB III

GANBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1 Sejarah Ringkas Kota Denpasar

Tidak ada wilayah pemerintahan yang muncul tanpa melalui proses sejarah, demikian juga halnya Kota Denpasar pada awalnya adalah merupakan pusat kerajaan Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya. Jika ditinjau dari arti katanya, maka secara etimologis kata Denpasar berasal dari dua suku kata yakni kata *den* dan *pasar*. Kata *den* berarti utara dan kata *pasar* berarti pasar atau *peken*. Jadi Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai ibu kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat baik secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun kependudukan/demografi.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan yakni: Kecamatan Denpasar Barat,

Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Febroari 1992. Berubahnya status kota Denpasar dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota. Berlandaskan pada visi dan misi yang telah dirumuskan, pemerintah menjalankan program-program pembangunan perkotaan.

3.2 Penjelasan Lambang

Setiap daerah mempunyai lambang tersendiri, demikian juga Kota Denpasar. Lambang daerah Kota Denpasar bebentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dan garis pinggir warna hitam. Motto "PURRADHIPA BHARA BHAVANA" artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Di dalam segi lima sama sisi tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi

- Dasar dengan bentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
- Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
- Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

- Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
- Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
- Warna kuning emas pada pura jagatnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

- Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
- Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
- Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

- Melambangkan kebudayaan yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
- Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah, melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar aselalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) buah, melambangkan

- Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.

- Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (pebruari).
- Kapas dengan bunga berjumlah 9 (sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Pebruari 1992.

3.3 VISI dan MISI

3.3.1 VISI

Dalam upaya mengarahkan pembangunan Kota Denpasar, maka pemerintah merumuskan Visi: **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan**. Visi ini selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi.

3.3.2 MISI

Adapun misi pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Penguatan jati diri masyarakat kota Denpasar berlandaskan budaya Bali;
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penegakan supremasi hukum (*law inforcement*);
4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (*welfare society*);
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

3.4 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Denpasar berada di bagian selatan Pulau Bali, tepatnya terletak di antara 08 35" 31" – 08 44" 49" Lintang Selatan dan 115 10" 23' – 115o 16" 27" Bujur Timur. Daerahnya

berbatasan masing-masing dengan Kabupaten Badung di sebelah utara, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan Selat Badung, dan di sebelah barat Kabupaten Badung. Secara administratif wilayah Kota Denpasar memiliki 4 Kecamatan, dan 43 desa/kelurahan serta 35 desa adat. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 11 desa adat, Denpasar Timur 11 desa/kelurahan dan 12 desa adat, Denpasar Barat 11 desa/kelurahan dan 2 desa adat, dan Denpasar Utara 11 desa/kelurahan dan terbagi menjadi 10 desa adat. Secara lengkap cakupan wilayah Kota Denpasar seperti tergambar pada Tabel. 3.1 berikut ini.

Tabel: 3.1 Jumlah Desa, Jumlah Banjar dan Jumlah Rumahtangga Di Kota Denpasar Tahun 2017

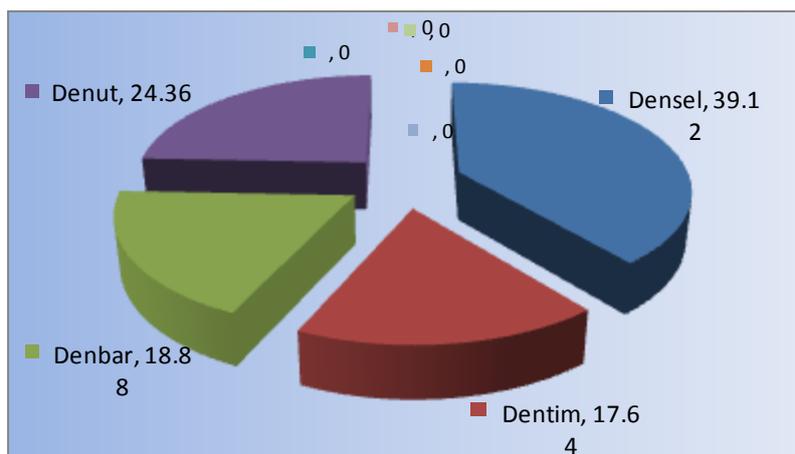
Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa *)			Jumlah Banjar *)		Jumlah Rumah Tangga **)
		Dinas	Kelurahan	Adat	Dinas	Adat	
5171010	Denpasar Selatan	4	6	11	105	92	NA
5171020	Denpasar Timur	7	4	12	87	91	NA
5171030	Denpasar Barat	8	3	2	112	119	NA
5171031	Denpasar Utara	8	3	10	102	59	NA
Kota Denpasar		27	16	35	406	361	0

Sumber: *) BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2017
 **) BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Secara keseluruhan luas wilayah Kota Denpasar mencapai 127,78 Km² atau 12.778 Ha (2,18 persen dari luas wilayah Provinsi Bali), termasuk tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha. Berdasarkan tata guna tanah, luas tersebut meliputi tanah sawah 2.717

Ha, dan tanah kering 9.999 Ha. Tanah kering terdiri dari tanah pekarangan 7.714 Ha, tanah tegalan 396 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak diusahakan 81 Ha, tanah hutan 613 Ha, tanah perkebunan 35 Ha, dan tanah lainnya seluas 1.162 Ha. Luas ini terbagi ke dalam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99 Km² atau 39,12 persen dari Kota Denpasar, 0,89 persen dari luas Provinsi Bali, Denpasar Timur, seluas 22,54 Km² (17,64 persen dari Kota Denpasar, dan 0,4 persen dari Provinsi Bali), Denpasar Barat, seluas 24,13 Km² (18,88 persen dari Kota Denpasar, dan 0,43 persen dari Provinsi Bali), sedangkan Denpasar Utara seluas 31,12 Km² (24,36 persen) dari Kota Denpasar, dan 0,55 persen dari Provinsi Bali). Di antara empat kecamatan yang ada di wilayah Kota Denpasar, tampaknya Denpasar Selatan mempunyai luas wilayah yang paling besar, yaitu 49,99 Km², dan Denpasar Timur dengan wilayah yang paling sempit (22,54 Km²) kurang dari setengah luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Secara lengkap hal ini tampak pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar: 3.1 Persentase Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2017



3.5 Kondisi Demografi

Sampai saat ini persoalan penduduk khususnya di wilayah perkotaan masih belum bisa ditangani secara tuntas, terutama persoalan penduduk pendatang. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali sepertinya juga menghadapi persoalan penduduk yang masih perlu penanganan yang serius. Penduduk sebagai sumberdaya manusia sekaligus menjadi sumberdaya pembangunan akan menjadi aset pembangunan apabila dapat diberdayakan secara optimal, sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tidak disertai kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusia suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex rasio, umur, pendidikan, dan lain-lainnya. Bagaimana profil kependudukan di Kota Denpasar? Berikut akan diuraikan berdasarkan indikator kependudukan.

3.5.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Untuk melihat kondisi penduduk secara umum dapat digunakan melalui penampilan beberapa indikator seperti halnya pengelompokan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk berdasarkan umur dimaksudkan untuk mengetahui komposisi penduduk usia anak-anak, remaja/usia produktif, dan usia lanjut (lansia). Struktur umur mencerminkan perubahan yang terjadi pada komponen demografi yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi pada satu kurun waktu tertentu. Pada awal transisi demografi, kelahiran yang tinggi menyebabkan proporsi penduduk usia muda cukup tinggi. Apabila hal ini diikuti dengan angka kematian yang tinggi, maka mereka yang bertahan hidup di usia di atasnya menjadi relatif berkurang. Teori transisi demografi ini melalui empat (4) tahap. Pertama, angka kelahiran dan kematian bergerak pada tingkatan yang tinggi. Artinya, pada satu kurun waktu tertentu angka kelahiran yang tinggi dibarengi dengan angka kematian yang tinggi pula. Kedua, angka kematian mulai memperlihatkan kecenderungan menurun tetapi angka kelahiran masih

cukup tinggi. Ketiga, angka kelahiran dan kematian bergerak menurun pada tingkat yang rendah. Keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur seperti tampak pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel . 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Di Kota Denpasar 2016 dan 2017

No	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	Jumlah Penduduk 2016			RASIO JENIS KELAMINAN	Jumlah Penduduk 2017			RASIO JENIS KELAMINAN
		L	P	L + P		L	P	L + P	
1	0 - 4	38,932	37,481	76,413	104.02	39,200	37,800	77,000	103.70
2	5 - 9	37,454	35,212	72,666	106.17	37,200	35,200	72,400	105.68
3	10 - 14	34,531	33,193	67,724	106.08	35,000	33,900	68,900	103.24
4	15 - 19	35,130	36,993	72,123	105.38	36,400	38,300	74,700	95.04
5	20 - 24	48,276	48,617	96,893	102.75	48,500	48,700	97,200	99.59
6	25 - 29	49,260	46,091	95,351	105.02	50,200	47,500	97,700	105.68
7	30 - 34	43,582	40,545	84,127	102.95	44,400	40,900	85,300	108.56
8	35 - 39	39,518	38,279	77,797	100.67	39,700	38,500	78,200	103.12
9	40 - 44	38,953	35,751	74,704	101.57	39,300	36,200	75,500	108.56
10	45 - 49	31,530	28,479	60,009	101.53	32,400	29,200	61,600	110.96
11	50 - 54	23,040	20,488	43,528	100.38	24,500	21,800	46,300	112.39
12	55 - 59	15,823	14,693	30,516	97.91	16,700	15,500	32,200	107.74
13	60 - 64	9,787	8,919	18,706	96.76	10,300	9,500	19,800	108.42
14	65 - 69	6,003	6,131	12,134	90.67	6,300	6,300	12,600	100.00
15	70 - 74	3,339	3,693	7,032	85.88	3,500	3,800	7,300	92.11
16	75+	3,119	4,453	7,572	75.66	3,100	4,500	7,600	68.89
JUMLAH		458,277	439,018	897,295	101.43	446,700	447,600	894,300	104.27

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017

Dari Tabel 3.2 tampak bahwa penduduk kota Denpasar dilihat dari kelompok umur persentase penduduk yang berumur 20 – 29 tahun ternyata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya. Ini berarti bahwa penduduk Kota Denpasar didominasi oleh penduduk usia produktif. Dilihat jumlah penduduk yang tergolong usia anak-anak yakni usia 0 – 18 tahun menurut definisi anak sesuai UU perlindungan Anak, persentasenya juga relative tinggi. Hanya saja dalam pengelompokan umur ini tergolong juga penduduk usia 19 tahun. Sementara itu penduduk yang sudah tergolong lanjut usia yakni 60

tahun ke atas persentasenya tidak terlalu tinggi dan dapat dikatakan paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya. Meskipun persentase penduduk lansia kecil dibandingkan jumlah penduduk produktif, namun mereka ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah karena mereka ini adalah kelompok penduduk yang tergolong rentan.

Bila dilihat dari perbandingan *sex ratio* dari penduduk Kota Denpasar nampak bahwa, secara umum seluruh jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk dua tahun terakhir tampak bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 897,295 pada tahun 2016 menjadi 914,300 tahun 2017. Demikian juga rasio jenis kelamin tampak mengalami peningkatan dari 101.43 menjadi 104.27. Realitas ini menggambarkan bahwa Kota Denpasar selalu menjadi tujuan penduduk luar untuk mengadu nasib di Kota Denpasar baik untuk mencari kerja ataupun untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu upaya untuk pengendalian penduduk perlu digalakkan sehingga jumlah penduduk bisa ditekan.

3.5.2 Penduduk menurut Status Perkawinan

Jika dilihat dari status perkawinannya, tampak bahwa separuh dari penduduk Kota Denpasar sudah berstatus menikah. Hal ini seperti tampak pada Tabel 3.3 berikut ini. Dari table ini tampak bahwa 58,71 % penduduk laki-laki sudah berstatus kawin, diantara yang sudah menikah ini ada yang sudah berstatus duda baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati. Demikian juga bagi penduduk perempuan. Dari 59,90% yang sudah berstatus kawin, 1,33% berstatus janda karena cerai hidup, dan 4,65% janda karena cerai mati. Dari data ini tampak bahwa jumlah penduduk yang berstatus janda jauh lebih tinggi jumlahnya dibandingkan yang berstatus duda. Hal ini dapat diduga bahwa jika laki-laki ditinggal oleh istrinya baik karena meninggal atau karena cerai hidup biasanya mereka akan tidak tahan berlama-lama menduda. Laki-laki secara umum kurang bisa hidup mandiri tanpa

pendamping atau tanpa istri. Oleh karena itu jika laki-laki ditinggal oleh istrinya akan lebih cepat menikah lagi dibandingkan dengan jika perempuan ditinggal oleh suaminya. Apalagi jika perempuan yang sudah mempunyai anak, biasanya mereka akan memilih bertahan hidup menjanda dengan anaknya.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2017

Karakteristik	Belum Kawin	Status Perkawinan			Jumlah
		Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Laki-laki	38,34	58,71	1,02	1,92	100,00
Perempuan	34,12	59,90	1,33	4,65	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017

Dari table 3.3 tampak bahwa jumlah penduduk yang menjanda lebih besar dibandingkan yang menduda. Mereka yang menjanda lebih banyak karena cerai mati. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika perempuan ditinggal oleh suaminya baik karena cerai mati maupun karena cerai hidup lebih bertahan hidup menjanda dibandingkan mereka harus kawin lagi. Sementara kalau laki-laki yang ditinggal istri baik karena cerai hidup atau cerai mati akan cepat menikah kembali karena mereka kurang bertahan hidup sendiri.

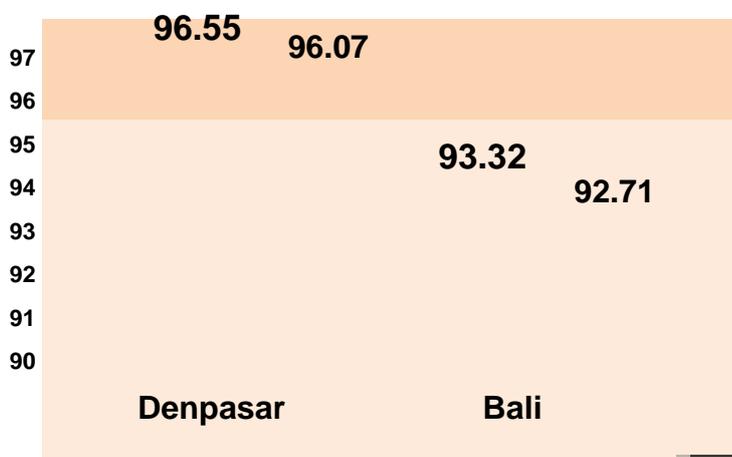
3.5.3. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan menuju kesetaraan gender adalah indek pembangunan gender (IPG). Semakin tinggi angka IPG suatu daerah menunjukkan bahwa kesetaraan gender dari daerah tersebut semakin bagus. Jika dilihat dari definisinya Indek Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM,

namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG sebagai indek komposit juga memiliki komponen-komponen pembentuk yang turut menentukan nilai dari IPG itu sendiri. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Oleh karena itu, pada gambar berikut akan disajikan perkembangan IPG di Kota Denpasar dan perbandingan dengan Bali selama dua tahun.

Gambar: 3.2 Perkembangan IPG Kota Denpasar dan Bali Tahun 2014 dan 2015



Sumber: <https://denpasarkota.bps.go.id>.

Dari data pada gambar 3.2 di atas tampak bahwa angka IPG Kota Denpasar tahun 2015 turun 0,48 poin dibandingkan tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di beberapa aspek yang terkait dengan indikator IPG seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi disparitas gendernya semakin besar. Untuk mengetahui

jawaban yang pasti entah indikator mana yang mempengaruhinya tentu perlu dilakukan kajian lebih jauh. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan kondisi IPG Provinsi Bali, IPG Denpasar masih berada di atas IPG Bali. Ini menandakan kondisi kesetaraan gender di Denpasar masih lebih bagus dibandingkan Bali secara keseluruhan. Dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai masalah pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha mengadakan perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) manusia secara teratur sejak lahir sampai mati. Dalam kaitannya dengan belajar, pendidikan dapat pula diartikan sebagai usaha mengubah perilaku orang lain, sedangkan belajar diartikan sebagai usaha aktif seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan dan belajar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka sudah dipastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi itu dapat dicapai melalui mekanisme pendidikan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa.

Akselerasi pembangunan di berbagai bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) terus menerus dilakukan. Di Indonesia umumnya dan di Denpasar khususnya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Menurut Sinaga dan Sri Hadiati (2001), Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai suatu daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau *power*) yang melekat pada manusia, dalam arti mempunyai kompetensi, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Lebih lanjut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat ini mengandung makna bahwa

setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Pasal 4 Ayat (1) juga dinyatakan bahwa pendidikan diadakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berikut ini akan dibahas mengenai keadaan pendidikan, dilihat dari analisis gender terhadap beberapa indikator pendidikan di Kota Denpasar.

4.1. APM Pada Jenjang Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk, terutama anak-anak sekolah, maka APM adalah salah satu indikator yang penting untuk diungkapkan, karena hal ini dapat dipakai untuk melihat apakah anak-anak yang masuk SD, SMP, dan SMA sudah sesuai dengan usianya atau tidak. APM di Kota Denpasar tahun 2016-2017 secara rinci dipaparkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2015/2016 dan 2016/2017

Tingkatan Sekolah	2015/2016		2016/2017	
	L	P	L	p
SD/MI	89,74	89,10	87,32	86,46
SMP/MTs	55,89	104,82	79,58	74,73
SMA/MA	80,26	67,90	80,26	71,56

Sumber: Disdikpora Kota Denpasar, 2018

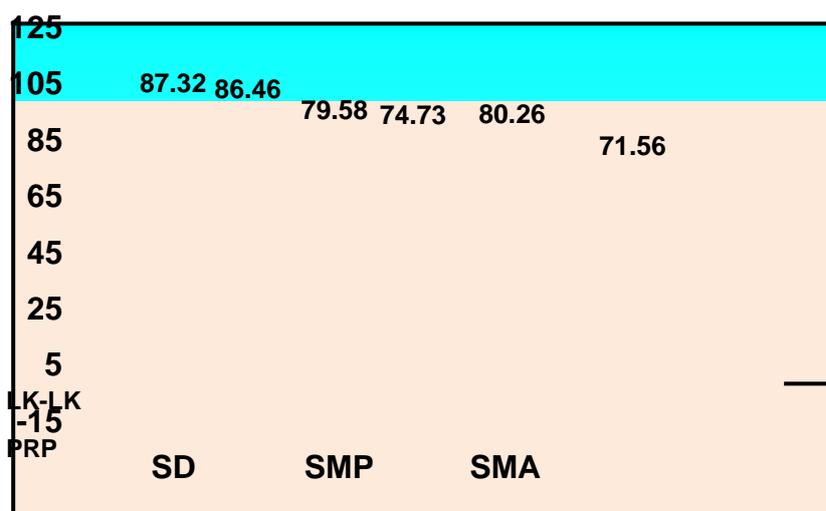
Dari Tabel 4.1 ini terungkap bahwa secara umum APM di semua jenjang pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan selama 2 tahun terakhir (2015/2016-2016/2017) relatif berfluktuasi. Pada jenjang

pendidikan SD/MI APM laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan, berbeda dengan APM jenjang pendidikan SMP/MTs tampaknya mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 23.69% pada APM laki-laki, sebaliknya APM perempuan justru mengalami penurunan drastis yakni sebanyak 30.09%. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA/MA tampak APM siswa laki-laki cukup stagnan, tetapi APM perempuan sedikit mengalami kenaikan yakni sebanyak 3.66%.

Jika dilihat dari perspektif gender, tampaknya APM pada jenjang SD/MI adalah yang paling berimbang atau paling setara gender. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/MTs adalah yang paling ekstrim, terutama tahun 2015/2016 dimana APM perempuan hampir 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan APM laki-laki, yakni 104.82 P : 55.89% L, berbeda dengan tahun berikutnya (2016/2017) APM perempuan tampak mendominasi. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar dan sangat penting untuk dilakukan pendalaman melalui penelitian, agar bisa ditentukan solusinya.

Gambaran umum kondisi APM tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Denpasar dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar: 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4.1 dapat dipahami sebagai berikut APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA masih di bawah 100%. Rata-rata APM yang masih di bawah 100 pada semua jenjang pendidikan pada masing-masing kecamatan di Kota Denpasar, perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya APM tersebut. Berdasarkan hasil kajian itu, sangat dimungkinkan untuk merumuskan alternatif pemecahannya secara lebih tepat, sehingga dapat memberikan hasil secara lebih baik.

Dari segi perspektif gender, tampak masih dijumpai perbedaan atau kesenjangan gender pada semua jenjang pendidikan. Kesenjangan gender APM yang paling tipis atau cukup berimbang terjadi di tingkat SD. Sedangkan APM tingkat SMP dan SMA tampak APM perempuan persentasenya lebih rendah dibandingkan laki-laki.

4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator lain yang dipakai untuk mengukur partisipasi penduduk di bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK biasanya digunakan untuk melihat gambaran mengenai kondisi siswa/murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia mereka. APK tingkat SD sebagai contoh, dihitung dengan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun dikalikan 100. APK pada berbagai jenjang pendidikan di Kota Denpasar, akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.2 APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar

Tingkatan Sekolah	2015/2016		2016/2017	
	L	P	L	P
SD/MI	100,94	100,43	98,03	96,88
SMP/MTs	75,75	140,27	107,72	103,03
SMA/MA	111,58	98,38	110,92	99,40

Sumber: Disdikpora Kota Denpasar, 2018

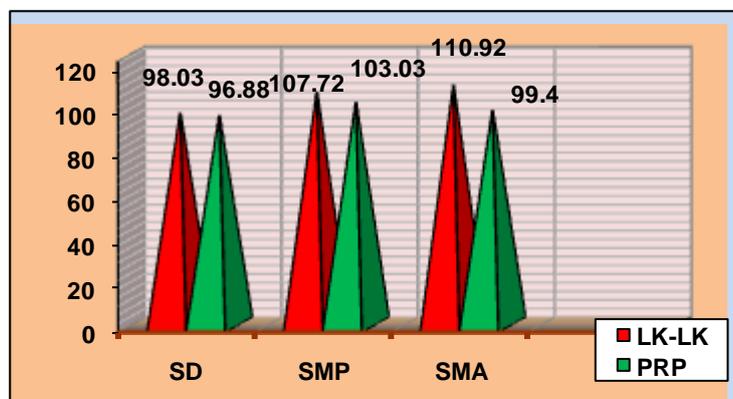
Secara umum APK pada semua jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir (2015/2016-2016/2017), kecuali di tingkat SMP/MTS terutama APK laki-laki (2015/2016) menunjukkan kondisi yang cukup

menggembirakan karena mencapai angka di atas 100%, bahkan pada . APK tertinggi ada pada tingkat SMP/MTs perempuan yakni (140,27%) tahun 2015/2016 dan SMA/MA (110,92%) tahun 2016/2017. Sedangkan APK terendah juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs perempuan (75,75%) tahun 2015/2016 dan terendah pada tingkat SD/MI perempuan juga (102,42%) tahun 2016/2017.

Dari perspektif gender, tampak masih dijumpai perbedaan atau kesenjangan gender pada semua jenjang pendidikan. Kesenjangan gender APM yang paling tipis terjadi di tingkat SD. Sedangkan kesenjangan gender yang paling tinggi terjadi pada APK tingkat SMP/MTs, terutama tahun 2015/2016 didominasi APK perempuan dengan perbandingan 75,75 L: 140,27 P. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada semua jenjang pendidikan APK perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan APK laki-laki. Bisa diduga ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yakni karena memang jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada penduduk laki-laki atau karena faktor lain yang perlu didalami melalui penelitian untuk kemudian ditentukan solusinya.

Jika digambarkan secara umum perbandingan APK anak laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2016/2017 dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini.

Gambar: 4.2 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Dari data yang tertuang pada gambar 4.2 dapat diketahui beberapa hal penting sebagai berikut. APK tingkat SD tahun 2017 sudah mencapai angka di atas 90% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini kesenjangan gender tidak terlalu menonjol. Kesenjangan gender agak menonjol tampak pada jenjang pendidikan SMA.

4.3 Jumlah Siswa

Siswa adalah anak usia sekolah yang berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal pada tiap-tiap sekolah sesuai dengan penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jumlah siswa di Kota Denpasar tahun 2015/2016-2016/2017 menurut jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun 2015/2016-2016/2017

Jenjang Pendidikan	2015/2016			2016/2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SD	44.105	40.750	84.855	45,500	42,047	87,547
SMP	13.598	24.931	38.529	20,906	19,402	40,308
SMA	9.183	9.700	18.883	9,371	9,922	19,293
Jumlah	66.886	75.381	142.267	75,777	71,371	147,148

Sumber: Disdikpora Kota Denpasar, 2018

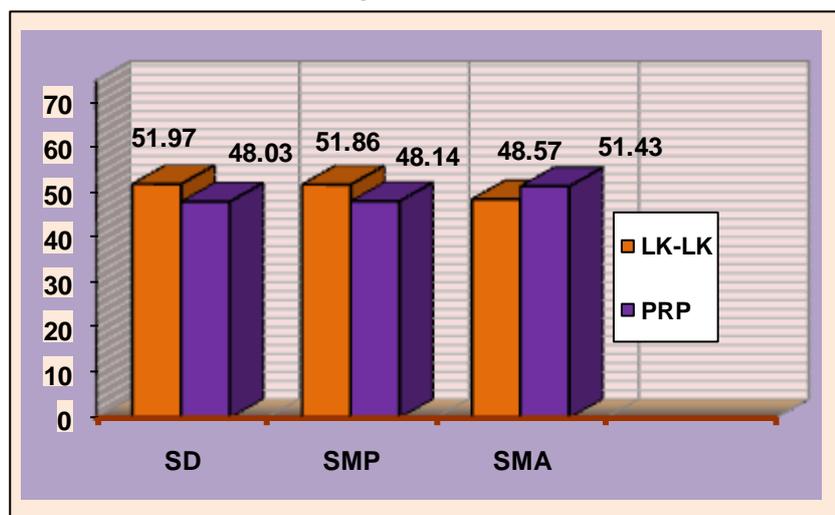
Jika dicermati tabel 4.3 di atas secara umum tampak jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir 2015/2016-2016/2017 sedikit mengalami kenaikan yakni sebanyak 4.881 orang (14,14%). Jumlah siswa terbanyak ada pada jenjang pendidikan dasar atau tingkat SD sebanyak 87.547 orang terdiri atas laki-laki 45.500 orang dan perempuan 42.047 orang dan yang terendah ada di tingkat SMA yakni 18.883 orang dengan perbandingan laki-laki 9.13 orang dan perempuan 9.700 orang. Kenyataan ini tampaknya sangat wajar jika dikaitkan dengan program pemerintah di bidang

pendidikan khususnya wajib belajar 12 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perspektif gender secara keseluruhan masih tampak terjadi ketimpangan pada semua jenjang pendidikan. Ketimpangan gender tidak terlalu menonjol terjadi pada jenjang pendidikan SD dan SMA, sedangkan di SMP tampak kesenjangan gender sangat tinggi terutama di tahun 2015/2016 sangat didominasi oleh siswa perempuan. Ini berarti siswa SD perempuan jauh lebih banyak melanjutkan ke SMP dibandingkan dengan siswa laki-laki, mengingat jumlah siswa SD cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum perbandingan persentase siswa laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan SD – SMA seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar: 4.3 Persentase Siswa SD- SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Dari gambar di atas tampak bahwa kesenjangan gender di dunia pendidikan terutama pada akses dan pemerataan hanya kelihatan agak menonjol pada jenjang pendidikan SMA. Sementara pada jenjang pendidikan lainnya hampir sudah menunjukkan kesetaraan.

4.4 Guru yang Tersertifikasi

Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu kualifikasi guru sangat penting. Guru yang baik adalah guru yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional, baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Di sinilah arti pentingnya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses pembelajaran yang baik dan hasil yang bermutu dari proses tersebut. Dalam kaitan ini, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen mengamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan sehat jasmani dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan pemikiran yang terkandung di dalam amanat tersebut, setiap guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik, hanya diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut. Sampai dengan tahun 2015/2016 dan 2016/2017, jumlah guru yang tersertifikasi pada beragam jenjang pendidikan di Kota Denpasar dapat diketahui pada penjelasan berikut.

4.4.1 Jumlah Guru SD Yang Tersertifikasi

Untuk memahami jumlah guru SD yang sudah tersertifikasi tentu harus dikaitkan dengan jumlah guru sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.4 di atas. Secara rinci data guru SD yang tersertifikasi di Kota Denpasar tahun 2015/ 2016 dan 2016/2017 diuraikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Guru SD yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016-2016/2017

N O	Kecamatan	2015/2016			2016/2017		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Kec. Denpasar Barat	300/26.45	827/27.51	1,127	144/25.35	405/27.44	549
2	Kec. Denpasar Selatan	320/28.22	758/25.22	1,078	162/28.52	366/24.80	528
3	Kec. Denpasar Timur	239/21.07	649/21.59	888	136/23.94	332/22.49	468
4	Kec. Denpasar Utara	275/24.25	772/25.68	1,047	126/22.19	373/25.27	499
	Jumlah	1.134	3.006	4.140	568/27.79	1476/27.21	2044

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 dapat diungkapkan bahwa secara keseluruhan jumlah guru SD yang tersertifikasi selama dua tahun terakhir (2015/2016-2016/2017) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan yakni dari 4.140 orang (2016) menjadi 2.044 (2017). Data kecamatan menunjukkan guru yang tersertifikasi tersebut berada di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, guru di Kecamatan Denpasar Barat adalah yang tertinggi (1.127 orang) tersertifikasi (2016), dan (549 orang) tahun 2017. Sedangkan terendah (888 orang) tahun 2016 dan (468) tahun 2017 berada di Kecamatan Denpasar Timur.

Dari perspektif gender tampak terjadi ketimpangan yang cukup menonjol pada guru laki-laki yakni dengan perbandingan 1.134 L: 3.006P (2016), dan 568 P:1.476 L (2017). Tentu saja hal ini di perlu di dalam untuk dicari faktor penyebabnya.

4.4.2 Jumlah Guru SMP Yang Tersertifikasi

Sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel 4.4.2 di bawah dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan jumlah guru SMP di Kota Denpasar yang tersertifikasi selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan tajam. Pada periode 2015/2016 jumlah guru SMP yang tersertifikasi sebanyak 2.256 orang, periode 2016/2017 menurun menjadi 966 orang. Data kecamatan menunjukkan di Kecamatan Denpasar Utara terdapat guru yang tertinggi (2.256 orang) yang tersertifikasi (2016), dan (966 orang) tahun 2017. Sedangkan terendah

(316 orang) tahun 2016 dan (166) tahun 2017 masih sama berada di Kecamatan Denpasar Timur. Secara rinci hal ini ditampilkan pada table 4.5 berikut.

Tabel :4.5 Jumlah Guru SMP yang sudah Sertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

NO	Kecamatan	2015/2016			2016/2017		
		L	P	Jumlah	L	P	Jlh
1	Denpasar Barat	178	273	451	84	146	230
2	Denpasar Selatan	274	406	680	122	70	192
3	Denpasar Timur	115	201	316	67	99	166
4	Denpasar Utara	363	446	809	155	223	378
	Jumlah	930	1.326	2.256	428	538	966

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar, 2018

Dari perspektif gender tampak terjadi ketimpangan yang cukup menjolok pada guru SMP laki-laki dan hal ini terjadi, baik pada tahun 2016, maupun 2017. Sebagaimana diketahui untuk bisa lolos sertifikasi seorang guru harus memenuhi persyaratan tertentu, apakah karena persyaratan ini guru laki-laki menjadi lebih lambat tersertifikasi dibandingkan dengan guru perempuan atau karena sebab lain, tentu harus dilakukan pendalaman melalui penelitian.

4.4.3 Jumlah Guru SMA dan SMK Yang Tersertifikasi

Kondisi yang tidak jauh berbeda tampaknya juga terjadi pada keberadaan guru SMA dan SMK yang tersertifikasi di Kota Denpasar pada tahun 2015/2016 dan 2016/2017. Hal ini tampak jelas pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Jumlah Guru SMA dan SMK yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

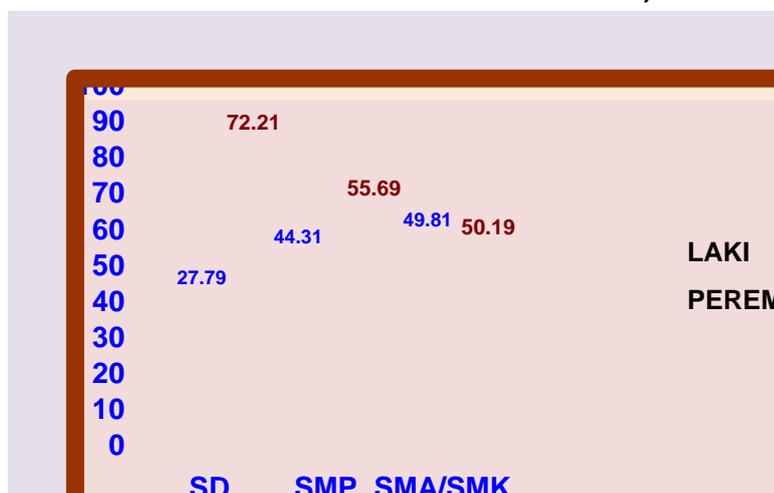
NO	Kecamatan	2015/2016			2016/2017		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	180	183	363	62	60	122
2	Denpasar Selatan	364	400	764	178	230	408
3	Denpasar Timur	326	380	706	85	111	196
4	Denpasar Utara	517	415	932	329	258	587
	Jumlah	1.387	1.298	2.685	654	659	1313

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara umum tetap terjadi penurunan jumlah guru SMA yang tersertifikasi selama 2 tahun terakhir di Kota Denpasar, yakni dari jumlah 2.665 orang (2016) menjadi 1.311 orang (2017). Persebaran guru SMA tersertifikasi tertinggi (275 orang) masih tetap tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara, dan terendah di Kecamatan Denpasar Barat. Dari perspektif gender tampak guru SMA dan SMK yang tersertifikasi tampak sedikit kurang berimbang tetapi selisihnya sangat tipis, dan ini bisa diartikan telah terjadi keseimbangan gender, baik pada tahun 2016, maupun 2017.

Bila dipersentasekan, maka perbandingan guru laki-laki dan perempuan yang sudah tersertifikasi berdasarkan jenjang pendidikan tampak seperti grafik berikut ini.

Grafik: 4.4 Persentase Guru SD, SMP, SMA dan SMK yang Telah Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

4.4 Jumlah Sekolah

Berbagai aspek dibutuhkan agar tercapai sistem pendidikan yang berkualitas. Selain keberadaan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat penting..Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan adalah gedung sekolah. Di Kota Denpasar jumlah sekolah di semua jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir secara rinci dijelaskan pada table 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	2015/2016	2016/2017
TK	294	294
SD/Sederajat	230	232
SLTP/Sederajat	66	66
SLTA/Sederajat	34	35
SMK	32	32

Sumber: Disdikpora Kota Denpasar, 2018

Jika dicermati tabel 4.7 di atas tampak jelas jumlah sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Hanya pada sekolah SD/Sederajat dan SLTA/Sederajat yang mengalami sedikit penambahan yaitu 2 gedung SD/Sederajat dan 1 gedung SLTA/Sederajat. Jumlah gedung sekolah SD adalah yang terbanyak, dan gedung SMK paling sedikit. Kondisi stagnan yang terjadi pada jumlah sekolah di semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar ini menegaskan bahwa jumlah penduduk usia sekolah juga tidak mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir karena sesungguhnya ada korelasi positif antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah.

BAB V

KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Serta mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan termasuk konsistensi kebijakan, keterlibatan, lintas sector, serta berdasarkan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat yang mutakhir.

Berdasarkan tujuan di atas, maka dirumuskalah paradigma sehat yang merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Adapun rumusan paradigma sehat tersebut telah tertuang di dalam visi “Indonesia Sehat 2010”. Visi yang tertuang di dalam paradigma sehat adalah visi jangka menengah, tentu saja visi jangka menengah itu telah tercapai akan ditindaklanjuti dengan visi jangka menengah selanjutnya yang kualitas indikatornya lebih tinggi. Begitu seterusnya, sehingga pembangunan kesehatan bisa berkelanjutan dan konsisten untuk menciptakan Indonesia Sehat.

Agar tercapai kondisi tersebut berbagai usaha telah dilakukan. Bahkan Negara pun telah menjamin melalui kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, di antaranya dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tersebut, pembangunan kesehatan dilakukan dengan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan terutama diarahkan pada lapisan masyarakat bawah (masyarakat berpenghasilan rendah).

Berkenaan dengan tujuan pembangunan kesehatan tersebut, telah dirumuskan program Panca Karsa Husada yang meliputi (1) peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan; (2) perbaikan lingkungan hidup masyarakat yang dapat menjamin kesehatan; (3) peningkatan status gizi masyarakat; (4) pengurangan kesakitan dan kematian; dan (5) pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan semakin diterimanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Terkait dengan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar, hal-hal yang akan dibahas berikut ini sesuai dengan data yang tersedia, yaitu sekitar pemberian ASI eksklusif, berat badan lahir rendah (BBLR), peserta KB, dan tenaga kesehatan.

5.1 Pemberian ASI Eksklusif

Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif merupakan tindakan terbaik bagi bayi. Karena, ASI mengandung nutrisi yang dapat memberikan kekebalan tubuh bayi, meningkatkan kualitas kesehatan dan dapat memberikan pertumbuhan bayi secara normal. Selain itu, secara ekonomi pemberian ASI jauh lebih praktis dan murah dari pada susu formula. Sebab harga susu formula relatif mahal bagi sebagian warga masyarakat. ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi mulai dari lahir sampai berumur enam bulan, tanpa diberikan makanan tambahan apapun, karena sampai umur tersebut kebutuhan zat gizi bayi dapat dipenuhi dari ASI saja. Dengan memberikan ASI secara eksklusif diharapkan kebutuhan gizi bayi akan dapat terpenuhi.

Secara rinci data mengenai bayi yang diberikan ASI eksklusif di Kota Denpasar tahun 2016-2017, tertuang pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Persentase Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif Usia 0--6 Bulan					
			2016			2017		
			L	P	L +P	L	P	L +P
1.	Denpasar Utara	Puskesmas I Denut	72.1	71.1	71.6	65.04	65.71	65.36
		Puskesmas II Denut	45.8	44.9	45.4	54.73	50.72	52.80
		Puskesmas III Denut	34.0	33.8	33.9	41.15	43.44	42.33
			44.2	43.7	44.0	60.92	159.88	160.48
2.	Denpasar Timur	Puskesmas I Dentim	66.3	65.9	66.1	56.64	37.61	47.30
		Puskesmas II Dentim	39.1	39.4	39.2	40.98	47.09	44.09
			52.1	52.0	52.0	97.62	84.70	91.38
3.	Denpasar Selatan	Puskesmas I Densel	41.2	41.9	41.5	46.67	47.87	47.31
		Puskesmas II Densel	38.2	38.3	38.2	40.31	42.66	41.47
		Puskesmas III Densel.	42.2	41.9	42.1	48.08	45.38	46.64
		Puskesmas IV Densel	42.9	39.1	41.2	48.94	41.94	46.15
			39.8	39.8	39.8	183.99	177.85	181.57
4.	Denpasar Barat	Puskesmas I Denbar	41.7	24.1	33.8	46.30	34.57	41.27
		Puskesmas II Denbar	55.0	91.8	71.6	52.00	48.48	50.35
			45.8	45.2	45.6	98.30	83.05	91.62
		Total Kota Denpasar	44.0	43.7	43.9	68.66	91.04	95.30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data pada tabel 5.1, dapat digambarkan sebagai berikut. Secara keseluruhan persentase bayi di Kota Denpasar tahun 2016 yang mendapat ASI eksklusif sebanyak 43,9%, dan meningkat tajam menjadi 95,30% tahun 2017. Pemberian ASI eksklusif ini dapat

dikatakan tergolong cukup bagus dan menggembirakan karena mencapai persentase relative tinggi.

Dilihat dari perspektif gender pemberian ASI eksklusif menunjukkan persentase lebih tinggi pada bayi perempuan, baik tahun 2016 maupun tahun 2017. Apakah hal ini bisa diartikan terjadi ketimpangan gender, belum tentu karena mungkin saja jumlah bayi laki-laki memang lebih tinggi daripada bayi perempuan. Karenanya penting diketahui jumlah bayi laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tahun 2016 dan 2017. Data Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif tertinggi ada di Kecamatan Denpasar selatan yakni 181.57%, dan terendah di Kecamatan Barat sebanyak 91.62%.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, tampaknya pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar tahun 2016 dan 2017 sudah cukup baik dan menggembirakan. Untuk itu tentu sangat penting melakukan usaha-usaha agar bisa mempertahankan bahkan meningkatkan pemberian ASI eksklusif ini kepada bayi.

5.2 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah yang selanjutnya disingkat menjadi BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu bayi baru lahir yang berat badannya 2500 gram atau lebih rendah tanpa memandang masa gestasi. Dalam definisi ini tidak termasuk bayi-bayi dengan berat badan kurang daripada 1000 gram. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam satu jam setelah lahir. Ada berbagai hal yang menyebabkan terbanyak terjadinya BBLR adalah yaitu: (1) kelahiran premature, faktor ibu yang lain adalah umur, paritas, dan lain-lain, (2) faktor plasenta seperti penyakit vaskuler, kehamilan kembar/ganda, dan (3) faktor janin juga merupakan penyebab terjadinya BBLR (<https://idtesis.com/pengertian-berat-badan-lahir-rendah/>). Secara rinci data mengenai **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** di Kota Denpasar tahun 2016-2017, tertuang pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Denpasar Tahun 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)					
			L		P		L + P	
			JLH	%	JLH	%	JLH	%
1	DENPASAR UTARA	PUSKESMAS I	4	0.59	7	1.05	11	0.82
		PUSKESMAS II	6	0.84	6	0.86	12	0.85
		PUSKESMAS III	11	1.65	9	1.48	20	1.57
2	DENPASAR TIMUR	PUSKESMAS I	12	1.23	20	2.17	32	1.69
		PUSKESMAS II	6	0.81	4	0.56	10	0.69
3	DENPASAR SELATAN	PUSKESMAS I	22	2.53	15	1.91	37	2.24
		PUSKESMAS II	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		PUSKESMAS III	2	0.57	8	2.62	10	1.53
		PUSKESMAS IV	9	3.54	9	3.57	18	3.56
4	DENPASAR BARAT	PUSKESMAS I	12	0.99	15	1.24	27	1.12
		PUSKESMAS II	11	0.62	15	0.83	26	0.73
JUMLAH (KAB/KOTA)			95	1.09	108	1.25	203	1.17

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan bayi mengalami berat badan lahir rendah (BBLR) di Kota Denpasar pada tahun 2017 sebanyak 203 orang (1.17%). Bayi yang mengalami BBLR ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, dan yang terbanyak ditemukan di Puskesmas I di Kecamatan Denpasar Selatan yakni sebanyak 37 bayi (2.24%), dan yang terendah bahkan nihil (0%) juga terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan data yang terekam di Puskesmas II. Kondisi ini masih tergolong cukup baik karena jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah bayi berat lahir

rendah (BBLR) di Indonesia yang masih cukup tinggi. Data WHO mencatat Indonesia berada di peringkat sembilan dunia dengan persentase BBLR lebih dari 15.5 persen dari kelahiran bayi setiap tahunnya. Jika ditinjau dari perspektif gender bayi dengan status BBLR didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 108 orang (1.25%) lebih tinggi daripada perempuan sebanyak 95 orang (1.09%).

5.3 Status Gisi Balita

Berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, namun demikian pada kenyataannya masih ada balita yang menyandang kasus gizi buruk. Hal ini seperti terlihat pada Tabel 5.3 berikut ini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak namun hal ini perlu ditanggulangi sehingga tidak ada lagi anak yang berstatus gizi buruk.

Tabel . 5.3 Cakupan Balita Gizi Buruk di Kota Denpasar Tahun 2017

KECAMATAN	Kasus Balita Gizi Buruk		
	Jumlah Ditemukan		
	L	P	L+P
Denpasar Utara	0	3	3
Denpasar Timur	0	0	0
Denpasar Selatan	0	1	1
Denpasar Barat	1	0	1
Jumlah	1	4	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2018.

Dari tabel di atas tampak bahwa di Kota Denpasar masih ada anak yang berstatus gizi buruk sebanyak 5 orang. Dari ke lima ini paling banyak (3) orang anak ada di Kecamatan Denpasar Utara, satu orang ada di Denpasar Selatan dan satu orang lagi ada di Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur aman dari anak yang berstatus gizi buruk..

5.3 Peserta Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan itu, KB adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Dalam upaya mencapai hal tersebut, dibuatlah beberapa cara untuk mencegah atau menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk pemilihan kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Data mengenai peserta KB di Kota Denpasar pada tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat pada Tabel 5.4. Data pada Tabel 5.3 menunjukkan, bahwa secara keseluruhan jumlah PUS di Kota Denpasar pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 86.175 orang dan peserta KB aktif sebanyak 69,686 orang (80,9%). Sedangkan tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yakni jumlah PUS sebanyak 79,064 orang dan peserta KB aktif sebanyak 60,363 orang (76,3%). Jumlah peserta KB yang paling banyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan, yaitu 83.9 %, yang terdapat pada data Puskesmas I. Sebaliknya, jumlah peserta KB yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Denpasar Barat yakni 71,4% yang diperoleh dari data Puskesmas I. Demikian pula PUS, jumlah yang paling banyak dijumpai di Kecamatan Denpasar Barat, yakni 11.098 orang berdasarkan data dari Puskesmas II sedangkan jumlah PUS yang paling kecil dijumpai di Kecamatan Denpasar Barat (Puskesmas I), yaitu 2,264 orang. Secara rinci data peserta KB di Kota Denpasar tahun 2016-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Jumlah Peserta KB di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	2016		Jlh PUS	2017	
			Peserta KB Aktif			Peserta KB Aktif	
			Jumlah	%		Jlh	%
Denpasar Selatan	Puskesmas I	10.133	8.467	83,6	5,077	3,718	73.2
	Puskesmas II	5.287	4.412	83,4	7,513	5,389	71.7
	Puskesmas III	3.368	2.748	81,6	7,535	5,552	73.7
	Puskesmas IV	2.099	1,831	87,2	7,854	6,185	78.7
Denpasar Timur	Puskesmas I	8.319	6.856	82,4	8,433	7,079	83.9
	Puskesmas II	10.585	8.312	78,5	10,08	8,335	82.7
Denpasar Barat	Puskesmas I	11.784	9,961	84,5	5,261	3,758	71.4
	Puskesmas II	12.347	9,795	79,3	3,347	2,735	81.7
Denpasar Utara	Puskesmas I	6.095	4,343	71,3	2,264	1,890	83.5
	Puskesmas II	8.238	6,557	79,6	11,08	7,801	70.3
	Puskesmas III	7.920	6,404	80,9	10,64	7,921	74.7
Jumlah		86.175	69,686	80,9	79,04	60,33	76.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

5.4 Jumlah Tenaga Kesehatan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, antara lain terdiri dari dokter, dokter spesialis dan dokter gigi. Berikut akan dibahas tenaga kesehatan di Kota Denpasar periode tahun 2016 dan 2017.

5.4.1 Jumlah Dokter Umum

Dokter merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam akselerasi pembangunan kesehatan. Oleh karena itu keberadaan tenaga medis ini perlu tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara terjangkau dan bermutu.

Sejatinya, dokter merupakan seorang cendekiawan yang dalam menjalankan profesinya langsung berhadapan atau berada di tengah-tengah masyarakat, dibekali nilai profesi yang menjadi pedoman dalam segala tindakannya. Nilai profesi itu meliputi kemanusiaan (*humanism*), etika (*ethics*) dan kompetensi (*competence*). Apabila nilai profesi ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka semua warga masyarakat yang membutuhkan, akan mendapat pelayanan kesehatan yang baik pula, dalam arti terjangkau dan berkualitas tinggi. Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pusat industri, perdagangan dan pariwisata, maka keberadaan dokter memegang peranan yang sangat penting guna mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Terkait dengan keberadaan dokter umum di Kota Denpasar secara rinci ditampilkan pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel: 5.5 Jumlah Dokter Umum yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017

No	Kecamatan	Dokter Umum		
		L	P	L+P
1.	Denpasar Timur	1	5	6
2.	Denpasar Selatan	5	9	14
3.	Denpasar Barat	1	7	8
4.	Denpasar Utara	1	9	10
	Jumlah	8	30	38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

Dari Tabel 5.5 tersebut di atas tampak bahwa pada tahun 2017 jumlah dokter umum di Kota Denpasar sebanyak 38 orang, terdiri atas laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. Dokter ini tersebar di seluruh kecamatan, dan terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan (14 orang), serta terkecil (6 orang) ditemukan di Kecamatan Denpasar. Data ini menunjukkan, bahwa tenaga dokter umum di Kota Denpasar didominasi oleh dokter perempuan, yang berarti terjadi ketimpangan gender. Dalam hal ini yang perlu dilakukakn adalah mendorong kaum laki-laki untuk menjadi dokter umum.

5.4.2 Dokter Spesialis

Dokter spesialis adalah [dokter](#) yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana(spesialisasi) untuk dapat menjadi dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter dan dokter gigi setelah dokter umum dan dokter gigi menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan [dokter](#) atau dokter gigi. Secara rinci dokter spesialis di Kota Denpasar tahun 2016-2017 yang tersebar di berbagai rumah sakit ditampilkan pada tabel 5.6 berikut

Tabel 5.6 Jumlah Dokter Spesialis yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Tempat Tugas	2016		Jlh	2017		Jlh
	Dokter spesialis			Dokter spesialis		
	L	P	L	P		
RS Tk II Udayana	7	2	9	11	2	13
RS Polda Bali	17	3	20	17	4	21
RSUP Sanglah	128	58	186	128	62	190
RS Puri Raharja	51	16	67	55	18	73
RS Dharma Yadnya	3	1	4	27	4	31
RS Kasih Ibu Denpasar	53	22	75	51	22	73
RS Bakti Rahayu	19	8	27	31	12	43
RS Bali Med	78	36	114	4	-	4
RS Surya Husada Ubung	20	9	29	16	15	31
RS BROS	79	17	96	68	32	100
RS Puri Bunda	27	16	43	33	17	50
RSUD Wangaya	0	0	0	35	13	48
RSU Daerah Bali Mandara	0	0	0	24	21	45
Total	482	188	670	500	222	722

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

Dari Tabel 5.6 tersebut di atas tampak bahwa secara jumlah dokter di Kota Denpasar mengalami sedikit kenaikan yakni sebanyak 52 orang dari tahun 2016 ke 2017. Dokter spesialis ini tersebar di seluruh rumah sakit negeri dan swasta di Kota Denpasar, dan terbanyak bekerja di RSPU Sanglah (190 orang), dan terkecil di RS Bali Med (4 orang). Dari perspektif gender keberadaan dokter spesialis ini berbanding terbalik dengan dokter umum yakni yang didominasi oleh dokter spesialis laki-laki, yang berarti terjadi ketimpangan gender pada perempuan. Untuk itu sangat penting mengupayakan agar perempuan lebih tertarik lagi untuk menjadi dokter spesialis.

5.4.3 Dokter Gigi

Selain dokter umum keberadaan dokter gigi juga sangat penting, hal ini mengingat masyarakat juga tidak bisa mengabaikan kesehatan gigi. Saat ini pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dokter gigi ini, terbukti dengan dibukanya fakultas kedokteran gigi baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang ada di Bali. Pemerintah Kota Denpasar nampaknya sangat perhatian pada kesehatan gigi masyarakatnya, hal ini terbukti di setiap puskesmas yang ada sudah dilengkapi dengan dokter gigi.

Secara rinci data tentang keberadaan dokter gigi di Kota Denpasar pada tahun 2017 seperti tampak pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Jumlah Dokter Gigi yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017

No	Kecamatan	Dokter Gigi		
		L	P	L+P
1.	Denpasar Timur	1	7	8
2.	Denpasar Selatan	1	11	12
3.	Denpasar Barat	3	7	10
4.	Denpasa Utara	4	6	10
	Jumlah	9	31	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

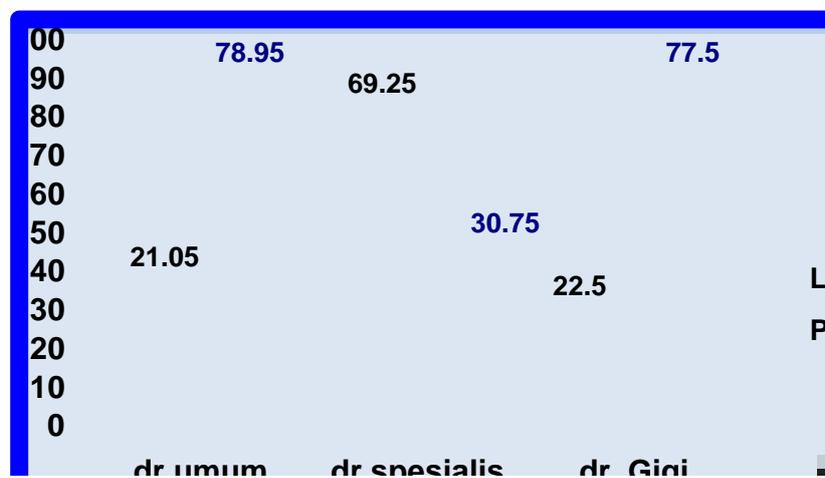
Dari Tabel 5.7 tampak bahwa jumlah dokter gigi di Kota Denpasar pada tahun 2017 berjumlah 40 orang yang terdiri dari 9 dokter gigi laki-laki dan 31 orang dokter gigi perempuan. Dokter gigi ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, terbanyak ditemukan di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 12 Orang dan paling sedikit (8 orang) ada di Denpasar Timur.

Jika dilihat dari perspektif gender, sama halnya dengan keberadaan dokter umum yang jumlahnya lebih banyak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan untuk menjadi dokter gigi

sudah terbuka lebar, namun demikian dipandang perlu juga mendorong laki-laki untuk menjadi dokter gigi.

Jika data tersebut di atas ditampilkan dalam persentase maka perbandingan jumlah dokter laki-laki dan perempuan akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 5.1 Persentase Dokter menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017



Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2017

BAB VI

EKONOMI

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (*nomos*) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga. Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat antara lain bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan sektor ekonomi menjadi begitu penting karena sangat terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Alam dengan berbagai potensinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dan untuk kesejahteraan ekonomi manusia. Jadi, kegiatan atau pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai penggerakannya. Terkait dengan masalah tersebut, beberapa hal yang menyangkut sumber daya manusia terutama yang berkaitan masalah perkerjaan sangat penting untuk mendapat perhatian. Adapun masalah-masalah tersebut adalah: angkatan kerja, pekerja dan jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sector ekonomi, satu diantaranya adalah dengan melakukan sensus ekonomi. Sensus ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja, yaitu tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut seringkali dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan GNP (*Gross National Product/Produk Nasional Bruto*) per kapita dan alokasi GNP per sektor untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk

yang bekerja. Khususnya alokasi angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan terutama persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri (manufaktur), dan jasa dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pembangunan suatu daerah.

Situasi dan kondisi suatu masyarakat sangat beragam sifatnya. Hal ini ditunjukkan oleh sistem sosial budaya masyarakat seperti adanya perbedaan kesempatan kerja, peluang kerja, dan jenis pekerjaan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan kemudian mengakibatkan perbedaan indikator ketenagakerjaan antara kedua jenis kelamin tersebut. Idealnya, setiap pekerjaan dapat diberikan secara terbuka kepada kedua jenis kelamin asalkan mereka mau dan mampu atau sanggup mengerjakannya, kecuali jenis pekerjaan yang secara mendasar memang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dilihat dari perspektif gender hal yang penting dikaji adalah mengkritisi relasi penduduk laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, termasuk memastikan apakah masing-masing jenis kelamin terutama perempuan mampu bersaing untuk merebut peluang dan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.

Secara konseptual dunia kerja di Indonesia mengakui bahwa penduduk yang tergolong angkatan kerja dan sebagai pekerja adalah mereka yang berusia di atas 10 tahun. Berdasarkan data sensus/survei indikator ketenagakerjaan menyangkut hal-hal seperti tenaga kerja asing, kegiatan utama yang dilakukan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan kerja dan status pekerjaan, tingkat upah, dan sebagainya.

Seperti juga Bali umumnya, yang menjadi prioritas utama pembangunan Kota Denpasar khususnya hingga saat ini adalah pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini mengingat pembangunan ekonomi menjadi indikator utama dalam mengukur kesejahteraan rakyat. Berbicara masalah pembangunan ekonomi, ini berarti pembicaraan tidak dapat dilepaskan dengan sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sentral, terutama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dimana

kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam masyarakat. Atas dasar kenyataan tersebut, maka masalah sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah penduduk dan angkatan kerja, baik yang secara kuantitatif maupun kualitatif wajib mendapat prioritas perhatian, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Bagaimana kondisi penduduk Kota Denpasar terkait dengan sektor ekonomi? Berikut akan dibahas beberapa indikator sesuai dengan data yang tersedia.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan pusat pariwisata Bali dengan gaya tariknya tersendiri menjadi orientasi atau tujuan bagi banyak orang untuk mengadu nasib mencari pekerjaan di kota ini. Orang-orang yang datang ke Denpasar tidak saja berasal dari Bali tetapi banyak juga dari luar Bali bahkan dari luar Indonesia. Karena itu okupasi penduduknya pun menjadi sangat heterogin. Tantangan kemajuan dan globalisasi mau tidak mau menuntut kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Kondisi ini menuntut semua individu baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam konteks ini, perempuan harus dilihat sebagai pribadi mandiri dalam kebersamaan dan sumber daya manusia yang mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan diri. Dalam kaitan ini perlu diamati dari berbagai kegiatan utama penduduk secara menyeluruh. Walaupun data secara terpilah belum dapat dihimpun, akan tetapi dapat diduga bahwa penduduk Kota Denpasar mempunyai okupasi yang beraneka ragam. Data mengenai kegiatan utama penduduk Kota Denpasar berdasarkan lapangan pekerjaan dan jenis kelamin belum bisa diperoleh. Namun demikian dapat diduga bahwa jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk dapat dipastikan beraneka ragam seperti pegawai negeri maupun swasta, pedagang, wirausaha, jasa dan lain-lainnya.

Jika dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk terutama berdasarkan jenis kelamin secara umum sepertinya TPAK

perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Data terkait TPAK tahun 2017 juga belum dapat dihimpun.

6.2 Juru Parkir

Di Bali umumnya dan Kota Denpasar khususnya dewasa ini cukup sulit mencari pekerjaan, apalagi yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup memadai atau tinggi. Namun demikian tidak setiap pekerjaan membutuhkan latar belakang pendidikan tinggi, tetapi lebih diutamakan ketekunan bagi pekejaanya misalnya menjadi juru parkir. Pekerjaan juru parkir identik dengan tugas laki-laki, karena pekerjaan juru parkir dianggap sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi. Di samping itu, mereka yang bekerja sebagai juru parkir sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri umum dari angkatan kerja terutama yang bekerja sebagai juru parkir. Rendahnya pendidikan menyebabkan terbatasnya akses ke pekerjaan yang lebih baik terutama pekerjaan di sektor formal. Dengan pendidikan rendah yang mereka miliki maka pekerjaan yang bisa dilakoni adalah menjadi juru parkir. Pekerjaan juru parkir umumnya dilakoni oleh laki-laki namun tidak menutup perempuan menjadi juru parkir.

Adanya pemerataan kesempatan kerja di setiap sektor dan di setiap wilayah, menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintah pemerataan pendapatan penduduk, sehingga nantinya dapat menciptakan kesejahteraan. Sektor jasa merupakan salah satu sektor usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar seperti jasa parkir ini. Juru parkir adalah salah satu sektor jasa yang ada di kota Denpasar. Fakta menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha parkir menurut jenis kelamin di Kota Denpasar pada taun 2012 dapat dilihat dalam bentuk Tabel 6.1 berikut.

Tabel. 6.1 Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelataran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	2016			2017		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
Denpasar Selatan	82	1	83	86	2	88
Denpasar Timur	89	2	91	99	3	102
Denpasar Barat	78	2	80	75	2	77
Denpasar Utara	95	0	95	91	0	91
Total	344	5	349	351	7	358

Sumber: Kantor PD Parkir Kota Denpasar, 2018

Dari Tabel 6.1 tersebut di atas tampak bahwa pekerjaan sebagai juru parkir didominasi oleh laki-laki, baik di tahun 2016 maupun tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada anggapan bahwa pekerjaan ini lebih pantas ditekuni oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Disamping itu kemungkinan juga perempuan yang berminat sebagai juru parkir juga tidak banyak karena pekerjaan ini memerlukan fisik yang kuat dan harus bekerja di tempat yang panas. Jika dilihat perkembangan tenaga kerja ini, rupanya secara kuantitatif tidak terlalu banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya (2016), kalau tahun 2016 secara total juru parkir berjumlah 349, sedangkan tahun 2017 jumlahnya naik menjadi 358, jadi mengalami kenaikan 9 orang.

6.3 Petugas Kebersihan

Kebersihan pada hakekatnya merupakan syarat utama dari sebuah ibu kota provinsi seperti Denpasar apalagi Kota Denpasar sebagai kota pariwisata yang berwawasan budaya. Sebagai kota pariwisata dan berwawasan budaya, masalah kebersihan menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Masalah kebersihan akan membawa citra baik di mata masyarakat kota maupun wisatawan yang datang ke kota ini. Untuk menciptakan kota bersih dan asri harus didukung oleh petugas kebersihan dan oleh karena itu petugas kebersihan mempunyai peranan yang sangat penting untuk terciptanya citra bersih tersebut. Pada umumnya jenis pekerjaan yang dilakukan pada usaha

jasa petugas kebersihan tidak memerlukan persyaratan tingkat pendidikan dan keahlian khusus. Namun yang dituntut adalah keterampilan dari mereka yang bekerja di bidang ini. Keterampilan yang diharapkan sesuai dengan jenis pekerjaan biasanya diberikan pada saat seseorang sudah diterima sebagai karyawan. Kondisi yang sama juga terjadi pada lembaga jasa kebersihan dan pertamanan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas kebersihan dipilah-pilah menjadi 32 sektor pekerjaan yang secara rinci jumlah petugas kebersihan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Tenaga Kebersihan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	Tahun	
	2016	2017
Laki-laki	1.117	805
Perempuan	462	528
Total	1.579	1.333

Sumber : Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 2018

Jika mencermati tabel 6.2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan jumlah yang cukup drastis yakni berkurang 246 orang. Apakah penurunan ini karena purna tugas atau karena pemutusan hubungan kerja?. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti masih perlu dilakukan kajian. Jika dilihat dari perspektif gender tampak dengan jelas bahwa petugas kebersihan didominasi oleh laki-laki.

Dilihat dari rincian tugasnya tampak sebagai berikut: sektor angkutan, tugas ini dilakukan oleh laki-laki, Satgas, juga semuanya laki-laki atau nihil petugas perempuan. Untuk petugas bengkel semuanya laki-laki. Sementara pada sektor cikar semua laki-laki, Petugas komposting ada petugas perempuan tapi tidak sebanding dengan laki-laki. Pada sektor Depo dan Kontener semuanya laki-laki demikian juga tugas operator alat berat semuanya laki-laki.

Sementara pada Pasukan Bengang, Pasukan Elang, Pasukan gelatik, Pada Pasukan Perabasan, Pasukan Serbaguna, Pasukan service, dan Pasukan Suka Dukan semuanya laki-laki. Pada sektor Penyapuan dan jumali dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas secara keseluruhan tenaga dinas kebersihan dan lingkungan hidup Kota Denpasar tahun 2017 menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup tajam hampir di semua sektor. Secara persentase tenaga laki-laki dan perempuan pada tahun 2015 - 2017 seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar: 6.1 Persentase Tenaga Kebersihan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017.



Sumber: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 2018

6.4 Tenaga Pertamanan

Sebagai ibu kota provinsi dan daerah destinasi wisata tentu sangat diperlukan situasi yang bersih dan asri. Untuk mewujudkan keindahan dan keasrian kota maka diperlukan adanya tenaga khusus yang menangani pertamanan kota. Terkait dengan pertamanan kota Dinas terkait telah menugaskan petugas pertamanan di masing-masing sektor atau wilayah. Tabel berikut memaparkan data tenaga pertamanan sesuai sector dan jenis kelamin.

Tabel 6.3 Jumlah Tenaga Pertamanan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sektor Puputan Badung	13	1	14
2.	Sektor Perawatan	71	1	72
3.	Sektor Penyiraman	26	0	26
4.	Tenaga Taman Koridor Gatsu	3	2	5
5.	Tenaga Keamanan Youth Park	2	0	2
6.	Pengawas pakan Burung	1	0	1
	Jumlah	117	4	121

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertamanan Kota Denpasar.2018.

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2017 terdapat 121 tenaga pertamanan di Kota Denpasar yang terdiri dari 117 laki-laki dan 4 orang perempuan. Sama halnya dengan petugas kebersihan, tenaga pertamanan juga masih didominasi oleh tenaga laki-laki, hal ini kemungkinan disebabkan karena pekerjaan ini identik dengan urusan luar yang memerlukan tenaga kuat sehingga dianggap lebih pantas ditekuni oleh laki-laki. Jadi pada dasarnya ketimpangan gender dalam hal ini masih tampak dengan jelas. Dari 6 sektor yang membutuhkan tenaga pertamanan, sektor penyiraman yang paling banyak membutuhkan tenaga, sementara untuk pengawasan pakan burung hanya ada 1 orang.

6.5 Pemilik Salon

Di era sekarang hal yang paling penting bagi seseorang agar bisa lebih gampang memasuki pasaran kerja adalah memiliki skill. Secara umum pendidikan dapat melahirkan ketrampilan atau skill. Antara pendidikan dan keterampilan adalah dua hal yang sangat terkait. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang sangat menentukan jenis pekerjaan yang diperolehnya, karena bagi seseorang keahlian dan ketrampilan sangat dibutuhkan setidaknya sebagai

penunjang dalam melakukan suatu pekerjaan. Di samping pendidikan formal, banyak juga orang mengikuti pendidikan non formal seperti melalui kursus untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sehingga dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki seseorang dapat hidup mandiri, berwirausaha dengan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan bahkan untuk orang lain. Di Kota Denpasar banyak dijumpai usaha-usaha mandiri, salah satunya adalah dalam usaha jasa yaitu salon kecantikan, seperti yang terlihat pada tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4 Jumlah Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Lk-lk	Pr	Jmh	Lk-lk	Pr	Jmh
	(Or)	(Or)	(Or)	(Or)	(Or)	(Or)
Denpasar Utara	8	67	75	10	72	82
Denpasar Timur	35	119	154	35	122	157
Denpasar Selatan	33	160	193	36	166	202
Denpasar Barat	55	207	262	57	212	269
Jumlah	131	553	684	138	572	710

Sumber : Dinas Perijinan Kota Denpasar, 2017

Jika memperhatikan tabel 6.4 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa di Kota Denpasar sesuai dengan data yang diperoleh terdapat 684 orang pengusaha salon kecantikan pada tahun 2016 yang terdiri dari 131 atas nama laki-laki dan 553 atas nama perempuan yang tersebar di 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan jumlah pengusaha salon kecantikan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Denpasar cukup mengalami perkembangan. Hal ini menggambarkan semakin banyak orang yang mampu berwirausaha tanpa harus bergantung pada orang lain untuk bekerja, ini juga berarti membuka peluang kerja di sektor swasta. Jika dilihat perkecamatan ternyata Kecamatan Denpasar Barat jumlah pengusaha salon paling banyak jumlahnya, dan di Denpasar Utara jumlahnya paling sedikit.

Jika dilihat dari analisis gender ternyata pengusaha bidang usaha salon kecantikan jauh lebih banyak dilakoni oleh tenaga kerja

perempuan dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Kuat dugaan hal itu terjadi, karena pada bidang usaha salon kecantikan lebih membutuhkan tenaga yang lemah lembut dan hal itu secara umum dimiliki tenaga kerja perempuan. Disamping itu juga masih ada anggapan bahwa usaha salon yang pada intinya merupakan urusan kecantikan dianggap pantas dilakoni oleh perempuan. Namun anggapan ini lambat laun sudah mulai memudar terbukti dari semakin banyaknya laki-laki yang mau membuka usaha salon kecantikan. Kondisi ini nantinya akan mampu mewujudkan kesetaraan gender pada usaha ini. Jika dilihat persentase perbandingan pemilik usaha salon menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2016 dan 2017 seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar: 6.2 Persentase Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017



Sumber : Dinas Perijinan Kota Denpasar, 2018

Dari gambar di atas tampak bahwa baik tahun 2016 maupun tahun 2017 pemilik salon di Kota Denpasar sebagian besar perempuan. Namun demikian data di atas sudah cukup menggambarkan terjadinya suatu perubahan nilai gender karena ternyata saat ini kaum laki-laki sudah mau menggeluti usaha ini meskipun secara ideologi pada awalnya usaha ini dianggap sebagai ranahnya kaum hawa.

6.6 Tenaga Kerja di Bidang Usaha Fitnes

Setiap orang ingin hidup sehat dan bugar. Untuk mewujudkan kesehatan diri serta menjaga kebugaran tubuh bisa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara olah raga fitnes. Bisnis ini mempunyai prospek atau cukup menjanjikan dan memberikan peluang bagi pengusaha khususnya di daerah perkotaan seperti di Kota Denpasar. Usaha fitnes adalah merupakan salah satu usaha jasa yang dewasa ini cukup banyak diminati oleh masyarakat, dalam upaya kebugaran dan kesehatan diri. Bidang usaha ini termasuk salah satu bidang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak membutuh latar belakang pendidikan tinggi, di samping itu dapat juga menjadi penunjang pariwisata di Kota Denpasar. Tenaga kerja yang terserap di bidang usaha fitnes pada 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.5 berikut.

Tabel 6.5 Tenaga Kerja yang di Serap pada Bidang Usaha Fitnes Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

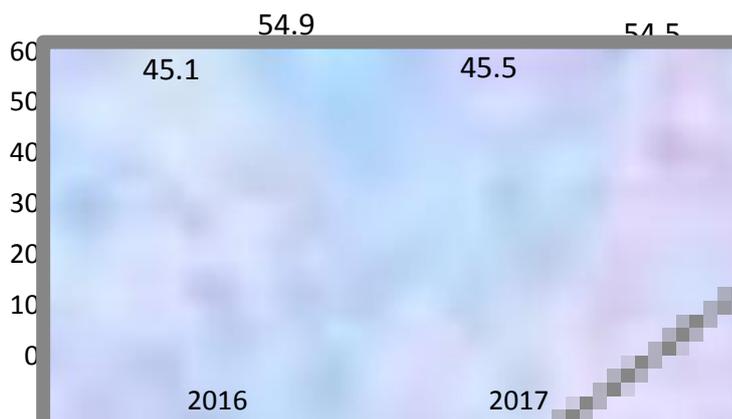
Kecamatan	2016			2017		
	Lk-lk	Pr	Jml	Lk-lk	Pr	Jml
Denpasar Utara	15	20	35	18	23	41
Denpasar Timur	25	28	53	27	31	58
Den. Selatan	31	38	69	29	40	69
Denpasar Barat	34	42	76	37	39	76
Jumlah	105	128	233	111	133	244

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2018.

Mencermati tabel 6.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 tenaga kerja yang terserap di bidang usaha fitnes berjumlah 233 orang yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebanyak 105 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 128 orang yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Tahun 2017 terjadi sedikit kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Jika dilihat dari segi analisis gender tampak sedikit lebih banyak tenaga perempuan yang terserap di usaha fitnes, ini kemungkinan disebabkan

karena saat ini banyak bermunculan usaha senam kebugaran yang pelanggannya banyak perempuan baik yang sudah berstatus ibu rumah tangga maupun remaja yang ingin menjaga bentuk tubuh agar tetap langsing. Tempat-tempat ini yang banyak menampung tenaga kerja perempuan. Jika dilihat secara persentase maka perbandingan tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang terserap di usaha fitness akan tampak seperti pada gambar berikut ini.

Gambar: 6.3 Persentase Tenaga Kerja yang di Serap pada Bidang Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2011 dan 2012



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2018.

6.7 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Perkembangan pariwisata di Bali umumnya dan di Kota Denpasar khususnya sebagai tidak dapat dipungkiri lagi telah mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat baik lokal maupun masyarakat luar Bali. Hal itu sudah mendapat pengakuan dari berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization* (WTO). Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997, merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk melakukan *re-positioning*

sekaligus *re-vitalization* kegiatan pariwisata Indonesia (<http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto>). Sektor pariwisata adalah merupakan salah satu sektor yang sangat penting di Kota Denpasar, meskipun dapat mengalami gangguan dengan adanya bom Bali tahun 2002 yang menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan ke Bali umumnya dan ke Kota Denpasar Khususnya. Turunnya kunjungan wisatawan ke Bali, berdampak juga terhadap menurunnya penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pariwisata seperti hotel baik berbintang maupun hotel non bintang, restoran dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.6 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2015 dan 2017

Jenis Usaha	2015			2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Hotel Berbintang	3.076	1.077	4.135	3.161	1.108	4.281
Hotel Melati	1.735	877	2.612	1.735	877	2.612
Pondok Wisata	231	126	357	231	126	357
Panti Pijat	34	211	245	53	211	264
Karaoke	509	127	636	215	33	248
Total	5.585	2.408	7.993	5.395	2.355	7.750

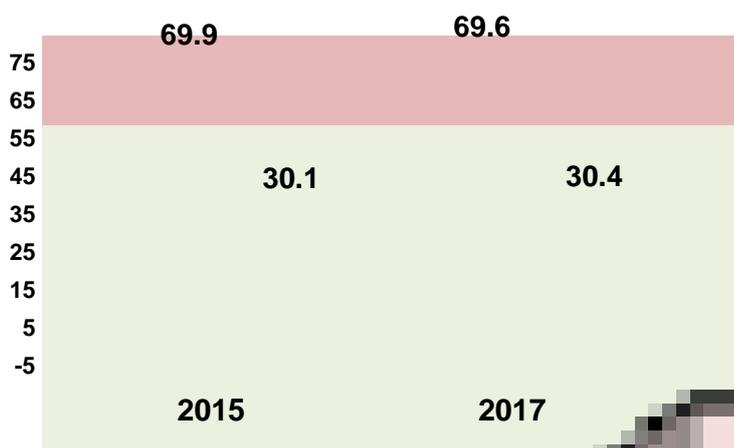
Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

Memperhatikan tabel 6.6 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja yang terserap didominasi oleh jenis usaha yang bergerak di bidang usaha hotel berbintang dan hotel melati dan pondok wisata. kemudian disusul bidang usaha karaoke. Pada tahun 2017 tenaga kerja yang terserap di usaha ini terutama di hotel berbintang tampak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Sementara untuk hotel melati dan pondok wisata kondisi tenaganya masih sama seperti tahun sebelumnya artinya tidak tampak terjadi peningkatan. Usaha yang mengalami penurunan tenaga kerja adalah usaha karaoke, hal ini mungkin disebabkan belakangan ini ada

beberapa karaoke telah dicabut ijin operasinya oleh pemerintah karena kasus narkoba dan lain-lain.

Jika dilihat secara umum tampaknya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata dari tahun 2015 ke 2017, apakah hal ini disebabkan karena beralih ke pekerjaan lain atau karena faktor lain. Untuk mengetahui jawabannya tentu perlu dikaji lebih jauh. Jika dilihat dari perspektif gender, maka perbandingan persentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan tampak seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 6.4 Persentase Tenaga kerja Laki-laki dan Perempuan yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar Th.2015 dan 2017



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

6.8 Pemilik Hotel

Seperti telah disinggung di atas bahwa Denpasar sebagai ibu kota provinsi dan sebagai daerah destinasi wisata tentu memerlukan sarana pendukung pariwisata yang memadai terutama sarana akomodasi berupa penginapan atau hotel. Di Kota Denpasar cukup banyak tersedia fasilitas akomodasi baik berupa hotel berbintang maupun non bintang, namun jika dilihat pemilik dari sarana ini tampaknya banyak yang dimiliki oleh investor dari luar Denpasar entah mereka berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Jika dilihat dari perspektif gender, tampaknya pemilik hotel kebanyakan dimiliki atau

atas nama laki-laki. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh seperti tampak pada tabel berikut ini.

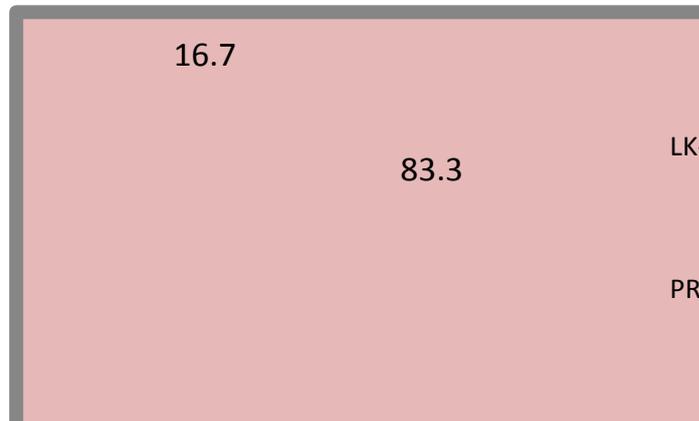
Tabel. 6.7 Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Th. 2016 dan 2017

Kecamatan	Tahun 2016			2017		
	Lk-lk	Pr	Jmh	Lk-lk	Pr	Jmh
Denpasar Selatan	93	17	110	93	17	110
Denpasar Timur	22	7	29	22	7	29
Denpasar Barat	41	6	47	41	6	47
Denpasar Utara	38	9	47	38	9	47
Jumlah	194	39	233	194	39	233

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Dari tabel di atas tampak bahwa pemilik hotel di kota Denpasar didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini tidak bisa dipungkiri karena memegang budaya patriarkhi telah menggariskan laki-laki sebagai pemegang kuas dalam keluarga, termasuk penguasaan terhadap harta kekayaan. Budaya ini telah membatasi akses perempuan terhadap kepemilikan harta kekayaan dalam keluarga. Namun tampaknya belakangan ini sejak gerakan kesetaraan gender dikumandangkan oleh pemerintah kelihatannya sudah terjadi sedikit perubahan dimana kaum perempuan sudah mulai mendapat kesempatan untuk menjadi pemilik hotel meskipun masih dalam jumlah yang terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki seperti tampak pada table 6.8. Dari 233 hotel yang ada di Denpasar, hanya 39 dimiliki oleh perempuan dalam hal ini adalah atas nama perempuan. Kepemilikan ini apakah karena memang atas usaha sendiri atau karena tidak ada suami. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Jika dipresentasikan kepemilikan hotel berdasarkan jenis kelamin tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 6.5 Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Th. 2017



6.9 Tenaga Kerja Restoran/RM

Sebagai salah satu sarana pendukung perkembangan pariwisata, restoran atau rumah makan mempunyai peranan yang sangat penting. Restoran atau rumah makan di Provinsi Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya, merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh pengusaha atau pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Bali yang merupakan pusat pariwisata Indonesia, menjadi tujuan para wisatawan sehingga untuk memenuhi kebutuhan akomodasi kedatangan wisatawan baik mancanegara maupun domestik sangat membutuhkan jasa boga ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang itu. Tenaga kerja yang terserap di bidang atau sektor restoran atau rumah makan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut.

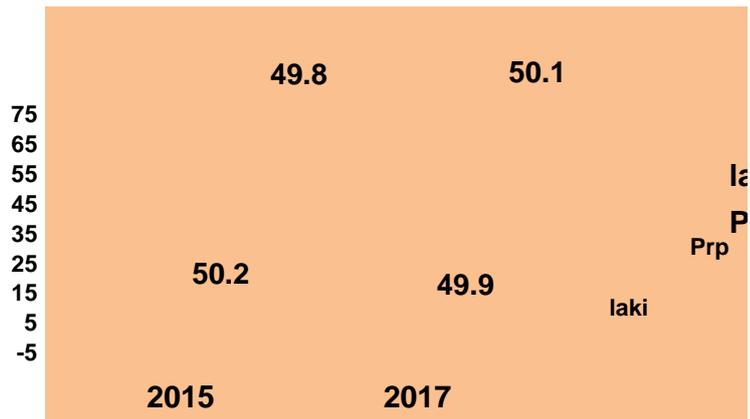
Tabel . 6.8 Tenaga Kerja yang terserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	2015			2017		
	Lk-lk	Pr	Jml	Lk-lk	Pr	Jml
Denpasar Selatan	1.439	1.365	2.804	1.439	1.358	2.797
Denpasar Timur	670	674	1.344	640	674	1.314
Denpasar Barat	678	658	1.336	670	658	1.328
Denpasar Utara	256	321	577	256	321	577
Jumlah	3.043	3.018	6061	3.005	3.011	6.016

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan Tabel 6.8 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari 4 kecamatan yang ada di Kota Denpasar tenaga kerja yang terserap tahun 2015 sebanyak 6.061 orang yang terdiri dari 3.043 orang laki-laki dan 3.018 orang perempuan. Tenaga kerja yang terserap berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak di Kecamatan Denpasar Selatan dan yang paling sedikit adalah di Denpasar Utara. Dilihat dari 4 kecamatan sebagai mana tersebut di atas tenaga kerja yang terserap berdasarkan jenis kelamin tampak di 2 kecamatan yakni di Kecamatan Denpasar Selatan dan di Kecamatan Denpasar Barat didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sementara di 2 kecamatan lagi yakni Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Utara tenaga kerja sedikit lebih banyak perempuan. Jadi apabila dilihat secara keseluruhan tenaga kerja yang terserap di restoran dan rumah makan tampak masih terjadi ketimpangan gender namun tidak terlalu menonjol. Bila dilihat perbandingan tenaga kerja yang terserap di restoran dan rumah makan selama dua tahun terakhir secara umum tampak terjadi sedikit penurunan baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Bila dilihat secara persentase perbandingan tenaga kerja laki-laki dan perempuan pada periode dua tahun terakhir tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar; 6.6 Persentase Tenaga Kerja yang terserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2017



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

BAB VII

SEKTOR PUBLIK

Gerakan untuk mendobrak budaya patriarki saat ini sudah mulai menggetas di masyarakat, hal ini seiring dengan visi dan misi pembangunan pemberdayaan perempuan dengan goalnya tercapainya kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Melalui berbagai strategi yang digalakkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan inipun mulai menunjukkan hasil. Ideologi gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah public tampaknya secara berangsur-angsur mulai berubah, hal ini terbukti dari eksistensi perempuan saat ini sudah memasuki dunia public dengan memerankan diri sebagai pekerja nafkah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa dewasa ini perempuan di Indonesia secara aktif telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam kenyataannya masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan baik di keluarga maupun di masyarakat bahkan di tingkat negara. Di tingkat negara menunjukkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi strategis yakni dalam pengambilan keputusan di sektor publik, dan hal ini telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan pada perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum laki-laki. Kondisi semacam ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat yang sangat kuat mengikat dan membelenggu.

Secara umum pada setiap masyarakat terdapat nilai-nilai atau norma yang berbeda-beda dimana hal ini biasanya dijadikan acuan untuk bertingkah laku. Pada masyarakat yang masih tradisional, ada kecenderungan masih bepegang kuat pada pandangan bahwa perempuan tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan baik

di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dalam kaitan itu, meminjam kerangka pikir Rosaldo tentang hubungan antara perempuan, kebudayaan dan masyarakat, yang secara tegas membedakan pola kegiatan masyarakat menjadi dua. **Pertama**, kegiatan di sektor domestik adalah untuk perempuan, yaitu kegiatan di lingkungan rumah tangga saja. **Kedua**, kegiatan di sektor publik, adalah bidang untuk pria, yaitu kegiatan di luar rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Dikotomi atau perberdaan seperti itu sampai saat ini masih begitu kental berlaku di masyarakat Bali umumnya dan Kota Denpasar khususnya sehingga menimbulkan ketidakadilan gender di berbagai aspek kehidupan seperti pada aspek politik, pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini berimplikasi pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan terutama berkaitan dengan partisipasinya pada di sektor publik.

Sampai saat ini secara normative tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi pada sektor publik. Hal tersebut dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak membedakan akses antara perempuan dan laki-laki untuk berperan di sektor publik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mencermati ketentuan Pasal 27 tersebut, maka konstitusi memberi kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan dan memberi hak yang sama pula dalam upaya pembelaan negara. Ini berarti tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) pada tahun

1984. Hal ini menunjukkan komitmen yang serius dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam kesempatan berperan aktif dalam sektor publik.

Untuk memahami bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan pada sektor publik pada saat ini. Terkait hal ini maka dalam tulisan ini akan dibahas secara rinci peran perempuan pada masing-masing sector publik antara lain melingkupi keanggotaan DPRD, Pengurus Partai Politik, Anggota Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, anggota KPU, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Berdasarkan Eselon, Yudikatif. Semua indicator ini dapat digolongkan dalam indicator politik yang sampai saat ini peran perempuan masih cenderung minim.

Berbicara tentang politik selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menyangkut kekuasaan dan dunia yang sangat keras dan kotor. Anggapan seperti ini berujung pada kepantasan seseorang masuk dunia politik, dalam konteks ini yang dianggap pantas dan cocok memasuki dunia ini adalah kaum laki-laki, sedangkan perempuan dianggap kurang cocok.. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dibarengi dengan adanya kesadaran semua pihak akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan mulai terakomodasi dalam memasuki dunia politik. Di Kota Denpasar keterlibatan perempuan di bidang politik sudah tampak pada berbagai bidang baik legislative, eksekutif maupun yudikatif seperti terpapar berikut ini.

7.1 Legislatif

7.1.1 Keanggotaan DPRD

Sebagai salah satu lembaga negara, lembaga kelegislatif adalah sebuah lembaga yang mempunyai peranan penting dalam kelangsungan suatu negara. Lembaga legislatif adalah dimana para anggota terdiri dari laki-laki dan perempuan. Fakta menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh

masyarakat dunia pada abad ke 21. Meskipun telah ada berbagai konvensi, komitmen internasional, dan komitmen nasional namun kenyataannya secara rata-rata jumlah perempuan yang terlibat di dunia politik masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di Kota Denpasar gambaran tentang kiprah perempuan dan laki-laki di dunia politik dapat dilihat pada salah satu lembaga politik yakni sebagai anggota legislatif.

Secara umum hasil pemilu legislatif tahun 2009, anggota legislatif (DPRD di Kota Denpasar didominasi oleh laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan dengan proporsi laki-laki 42 orang, dan perempuan 3 orang. Tiga orang anggota legislatif perempuan ini adalah hasil dari daerah pemilihan (DAPIL), yaitu Dapil 1 dan Dapil 2 sedangkan untuk Dapil 3 yakni Daerah pemilihan Denpasar Selatan tidak menghasilkan anggota legislatif perempuan. Keadaan yang sangat tragis adalah hasil pemilu legislatif 2009.

Fakta menunjukkan bahwa proporsi jumlah anggota legislatif laki-laki 44 orang dan perempuan 1 orang. Dikatakan demikian karena tidak saja terjadi ketimpangan gender yang signifikan, tetapi juga justru berkurangnya jumlah anggota legislatif perempuan dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni tahun 2004. Yang sangat menyedihkan adalah dimana Dapil 1 dan Dapil 2 yang pada pemilu legislatif tahun 2004 mampu menghasilkan dua dan satu orang anggota legislatif perempuan, namun pada pemilu legislatif pada tahun 2009 sama sekali tidak mampu menghasilkan 1 orangpun anggota legislatif perempuan. Malahan justru sebaliknya terjadi di Dapil 3, yaitu hasil pemilu legislatif tahun 2004 menghasilkan anggota legislatif 13 orang dan seluruhnya laki-laki. Maksudnya sama sekali tidak menghasilkan anggota legislatif perempuan, akan tetapi pada pemilu legislatif tahun 2009 mampu melahirkan seorang anggota legislatif perempuan dan 10 orang anggota legislatif laki-laki. Hal ini merupakan suatu prestasi dari perjuangan yang tidak mudah yang dilalui oleh perempuan.

Ketimpangan gender dalam keanggotaan legislatif (DPRD) Kota Denpasar, berdasarkan fakta bahwa jumlah perempuan yang duduk dalam keanggotaan legislatif amat kecil. Kondisi tersebut penting untuk

dicermati dan dilakukan upaya agar jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif dapat ditingkatkan. Pekerjaan ini tentu tidak mudah untuk dilakukan, oleh karena itu diperlukan kemauan, kemampuan, dan perjuangan yang tidak ringan. Sebab untuk dapat masuk menjadi calon legislatif harus melalui proses politik yang cukup panjang, komlek, dan rumit. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditentukan bahwa untuk menjadi calon legislatif harus melalui partai politik. Oleh karena itu dukungan dari partai politik mutlak dibutuhkan. Maksudnya apabila seseorang ingin menjadi anggota legislatif harus mempunyai tempat untung berjuang, maka orang yang bersangkutan harus masuk pada suatu partai politik tertentu sebagai wadah ia bernaung, Tentunya hal itu tidak mudah, melainkan melalui perjuangan yang penuh tantangan dan hambatan yang tidak ringan agar ia diterima dan terlibat dalam kepengurusan partai politik peserta pemilu kemudian setelah dicalonkan oleh partai politik tempatnya bernaung baru berjuang untuk dapat merebut satu kursi pada pemilu legislatif. Perjuangan untuk merebut satu kursi bagi perempuan jelas tidak mudan melainkan membutuhkan pengorbanan pemikiran, tenaga waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Perjuangan yang harus ditempuh tersebut adalah sangat berat terutama bagi perempuan. Untuk lebih jelasnya proporsi keanggotaan legislatif (DPRD) di Kota Denpasar seperti terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2014 – 2019

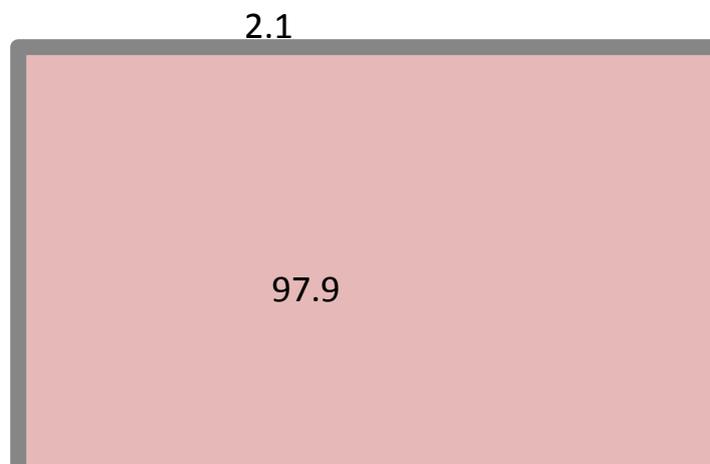
Partai	Periode 2014 – 2019 (orang)		
	Lk-lk	Pr	Jlh
Pdip	18	0	18
Golkar	8	1	8
Demokrat	6	0	6
Gerindra	5	0	5
Hanura	4	0	4
Pks	3	0	3
Nasdem	1	0	1
Jumlah	44	1	45

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2018

Mencermati tabel tersebut di atas, maka jelas tampak bahwa partisipasi perempuan di dibang politik praktis sangat kecil terutama pada lembaga legislatif. Hal itu memperkuat anggapan yang berkembang di masyarakat, seolah-olah membenarkan pandangan bahwa dunia politik itu adalah dunia yang keras, kejam, kotor, dan kasar sehingga tidak cocok dan tidak pantas untuk perempuan. Akibatnya apabila perempuan memasuki dunia politik, maka siap dengan beaya sosial (ejekan, cemoohan, dan lain-lain), dan yang paling penting adalah harus mempunyai kemampuan suber daya pribadi untuk bersaing masuk pada dunia politik praktis.

Jika data tersebut di atas dipersentasekan maka akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 7.1 Persentase Keanggotaan DPRD menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2014 - 2019



7.2 Pengurus Partai Politik

Partisipasi perempuan dalam politik praktis masih sangat minim dibandingkan dengan laki-laki. Untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan harus masuk dalam salah satu partai politik. Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi dan institusi strategis yang bisa dijadikan alat untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Intervensi kebijakan *affirmative action* atau tindakan khusus sementara

yang menyeluruh dalam Undang-Undang tentang partai politik dan pemilihan umum adalah suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan di atas. Secara normatif meskipun peraturan perundang-undangan sudah mencantumkan afirmasi berupa kuota 30 % perempuan di kepengurusan partai politik, namun dalam empiriknya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan secara normatif. Itu berarti tidak banyak membawa kemajuan terhadap perempuan di bidang politik. Hal ini dapat dilihat dalam bidang kepengurusan partai politik.

Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Kota Denpasar, disajikan dalam tabel di bawah ini.

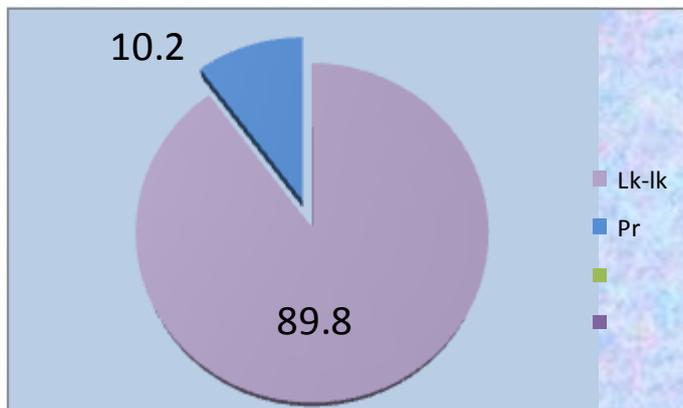
No.	Nama Partai Politik	Laki-	Perempuan	Jumlah
		Laki		(orang)
		(orang)	(orang)	(orang)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
2	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	3	0	3
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	2	1	3
4	Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	3	0	3
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3	0	3
6	Partai Barisan Nasional (PBN)	3	0	3
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	3	0	3
11	Partai Kedaulatan	1	2	3
12	Partai Persatuan Daerah	3	0	3
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	2	1	3
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	3	0	3
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	3	0	3
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	3	0	3
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	3	0	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	3	0	3
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2	1	3
21	Partai Republika Nusantara (PRN)	2	1	3
22	Partai Pelopor	3	0	3

23	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	0	3
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	2	0	2
26	(PNBK)	3	0	3
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	1	3
29	Partai Patriot	2	1	3
30	Partai Demokrat	3	0	3
Jumlah		79	9	88

Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar, 2017

Di kota Denpasar pada tahun 2017 masih tercatat 30 partai politik dengan jumlah pimpinan sebanyak 88 orang. Data jumlah partai politik beserta kepengurusannya tampaknya masih belum menunjukkan perubahan dari tahun sebelumnya (2016). Dari jumlah pimpinan partai tersebut, terdapat pimpinan laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan 9 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi dominasi laki-laki dalam pimpinan partai politik. Dominasi laki-laki terjadi hampir di semua partai politik yang ada di Kota Denpasar. Hanya beberapa partai politik yang menempatkan perempuan sebagai pengurus. Dari jumlah partai yang tidak mempunyai pimpinan perempuan tersebut, sangat disayangkan dimana partai besar dan berkuasa di Bali tidak mempunyai pimpinan perempuan seperti GOLKAR. Ini betul-betul kondisi yang sangat memprihatikan dimana perempuan tidak dapat menempatkan diri sebagai pimpinan pada partai besar tersebut, hal ini betul-betul pincang dalam kehidupan partai. Di samping itu ada satu partai politik yang dipimpin oleh 2 orang perempuan yaitu Partai Kedaulatan, dimana pada kepengurusan partai ini, yang dipimpin oleh 3 orang yang terdiri dari 2 orang pemimpin perempuan sementara pemimpin laki-laki hanya satu orang. Secara umum persentase pengurus partai politik dilihat dari perspektif gender seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar: 7.2 Persentase Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017



Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar, 2017

7.3 Anggota Panitia Pemilihan

Sebagai sebuah lembaga, partai politik tidak ada ketentuan yang melarang keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan partai. Walaupun demikian posisi perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya di pemerintahan sampai saat ini masih menghadapi cukup banyak tantangan dan hambatan. Selain karena keterwakilannya yang masih jauh di bawah ideal yang ditentukan oleh undang-undang partai politik, namun sejumlah tantangan lainnya pun menjadi persoalan yang tak mudah untuk dihadapi. Untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan tidak hanya dituntut sekedar berpartisipasi saja, melainkan hendaknya memiliki posisi strategis dalam kepengurusan partai misalnya posisi sebagai pengambil keputusan terkait dengan kepentingan lembaga, dalam hal ini duduk dalam kepengurusan partai.

Yang perlu dicermati adalah apakah sebuah lembaga partai politik dalam kepengurusannya memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota atau pimpinan partai?. Memang ada beberapa partai politik yang seolah-olah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan, namun sejatinya posisi yang ditempati perempuan hanya dalam posisi yang tidak menentukan kehidupan partai dan hanya cocok dijabat oleh perempuan, seperti hanya sebagai bendahara, seksi konsumsi, dan seksi-seksi lainnya dan

posisi-posisi itu sangat jarang dijabat oleh laki-laki. Sementara posisi yang strategis dijabat oleh laki-laki seperti jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris. Posisi dalam kepengurusan di suatu lembaga partai tersebut sangat menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut. Jadi posisi kepengurusan lembaga partai masih bersifat stereotipe.

Sementara itu dalam pelaksanaan Pemilu baik Pemilu legislatif, Pilpres maupun Pilkada sangat dibutuhkan terbentuknya panitia pemilihan. Secara normatif tidak ada pembatasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk ikut menjadi anggota panitia pemilihan. Namun pada kenyataannya anggota panitia pemilihan ini selalu didominasi oleh laki-laki hal ini tampak dari data yang terpapar pada Tabel berikut ini.

Tabel: 7.2 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2014-2019

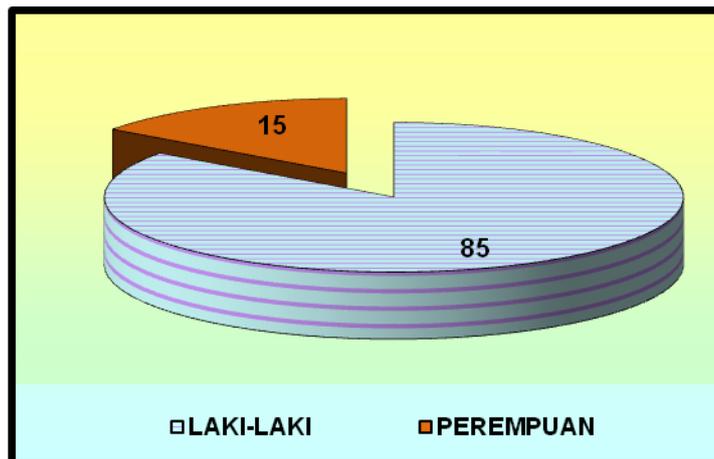
Kecamatan	Pilkada (orang)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Denpasar Utara	3	2	5
Denpasar Timur	5	0	5
Denpasar Selatan	5	0	5
Denpasar Barat	4	1	5
Jumlah	17	3	20

Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar 2017

Mencermati tabel 7.2 tentang anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) tersebut di atas, fakta menunjukkan adanya ketimpangan gender. Dari 4 kecamatan di Kota Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat hanya di dua Kecamatan yang ada anggota PPK perempuan yaitu di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Barat. Keseluruhan anggota PPK di Kota Denpasar berjumlah 20 orang dan dari 20 orang tersebut 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kondisi ini mencerminkan masih terdapat kesenjangan gender dalam anggota PPK di Kota Denpasar. Jika dipersentasekan maka perbandingan anggota PPK laki-

laki dan perempuan di Kota Denpasar tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 7.3 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2014- 2019



Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar

7.4 Anggota Panitia Pemungutan Suara

Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Banyak bentuk lembaga politik tempat perempuan mengaktualisasikan dirinya telah tersedia. Selain menduduki posisi penting di dalam kepengurusan lembaga partai politik tersebut di atas, partisipasi laki-laki dan perempuan di bidang politik juga dapat dilihat pada keanggotaannya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti tampak pada tabel 7.3 berikut.

Tabel: 7.3 Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Kecamatan	Tahun 2016 (orang)			Tahun 2017 (orang)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	30	0	30	30	0	30
Denpasar Timur	33	0	33	33	0	33
Denpasar Selatan	31	2	33	31	2	33
Denpasar Barat	33	0	33	33	0	33
Jumlah	127	2	129	127	2	129

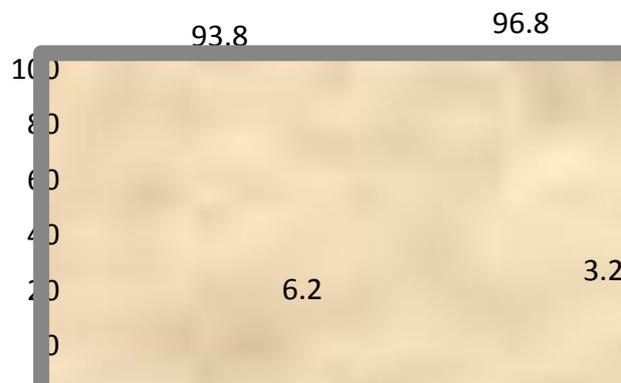
Sumber : Kantor KPU, Kota Denpasar Tahun 2017

Mencermati tabel 7.3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi ketimpangan gender dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Denpasar. Dari 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar yakni Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Dari 4 Kecamatan tersebut ternyata ada 1 Kecamatan yang nihil anggota PPS perempuan yaitu di Kecamatan Denpasar Timur. Jumlah anggota PPS di Kecamatan Denpasar Timur adalah 33 orang dan semuanya dijabat oleh laki-laki. Sementara di 3 Kecamatan lainnya terdapat 4 orang anggota PPS perempuan yaitu 2 orang di Kecamatan Denpasar Utara, 1 orang di Kecamatan Denpasar Selatan, dan 1 orang di Kecamatan Denpasar Barat. Jumlah anggota PPS di Kecamatan Denpasar Utara adalah 33 orang, 2 orang perempuan dan 31 orang laki-laki, di Kecamatan Denpasar Selatan jumlah anggota PPS adalah 30 orang dan hanya 1 orang dijabat oleh perempuan dan 29 orang dijabat oleh laki-laki, dan di Kecamatan Denpasar Barat jumlah anggota PPS di Kecamatan Denpasar Utara adalah 33 orang, 2 orang perempuan dan 31 orang laki-laki, di Kecamatan Denpasar Selatan jumlah anggota PPS adalah 30 orang dan hanya 1 orang dijabat oleh perempuan dan 29 orang dijabat oleh laki-laki, dan di Kecamatan Denpasar Barat jumlah anggota PPS adalah 33 orang dan hanya 1 orang dijabat oleh perempuan dan 32 orang dijabat oleh laki-laki. Secara keseluruhan jumlah anggota PPS di Kota Denpasar adalah 129

orang yang terdiri dari 125 orang laki-laki (96,8%) dan 4 orang perempuan (3,1%). Jumlah anggota PPS tahun 2016 dan tahun 2018 memang belum ada perubahan atau masih sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa anggota PPS di Kota Denpasar perlu mendapat perhatian yang serius agar anggota PPS perempuan ke depannya dapat ditingkatkan jumlahnya. Memang hal itu tidak mudah karena masih melekatnya pandangan bahwa dunia politik adalah ranahnya para laki-laki, walaupun pandangan yang demikian sulit dihilangkan, akan tetapi kalau kaum perempuan dapat menunjukkan sumber daya pribadinya, niscaya dimasa yang akan datang anggota PPS perempuan akan naik dan dapat mengimbangi kaum laki-laki.

Jika data tersebut di atas dibandingkan dalam bentuk presentase maka akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 7.4 Persentase Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017



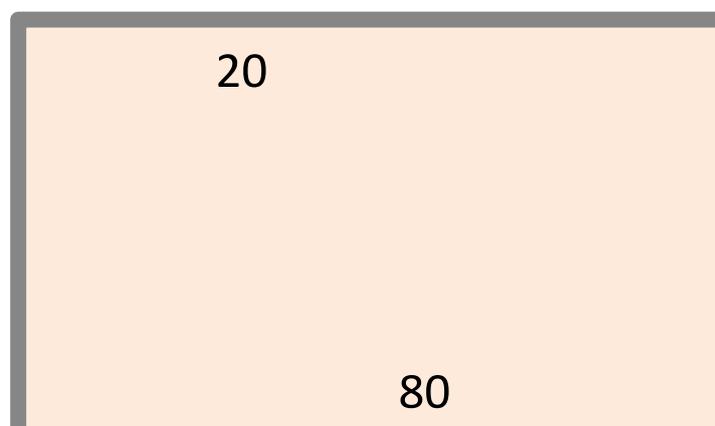
Sumber : Kantor KPU, Kota Denpasar Tahun 2017

7.5 Anggota KPU

Perempuan sebagai insan warga negara masih belum dapat memposisikan diri dalam segala aspek kehidupan, oleh karena itu perempuan semestinya memperbaiki sumber daya pribadinya agar mampu mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Perempuan di samping sebagai anggota pengurus partai politik, dan anggota panitia pemungutan suara, juga dapat menunjukkan partisipasinya dalam bidang politik lainnya yakni sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Melalui lembaga KPU perempuan dapat menunjukkan dirinya dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dalam kaitan itu di Kota Denpasar posisi perempuan di dalam keanggotaan KPU dapat diketahui pada gambar 7.5 berikut ini.

Gambar 7.5 Persentase Anggota KPU Kota Denpasar Periode Tahun 2013-2018.



Sumber : Kantor KPU, Kota Denpasar Tahun 2018

Pada gambar 7.5 mengenai jumlah anggota KPU di Kota Denpasar pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) orang anggota KPU. Dari jumlah lima orang anggota KPU tersebut, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Memperhatikan proporsi yang demikian, menarik untuk dicermati karena suatu fakta menunjukkan adanya keseimbangan dalam keanggotaan KPU. Kondisi tersebut sangat mengembirakan manakala dilihat dari analisis gender karena ketimpangan gender yang signifikan seperti yang terjadi pada keanggotaan lembaga-lembaga politik lainnya. Kondisi tersebut perlu dicermati dimana perempuan cukup mampu bersaing untuk memperebutkan posisi di dalam keanggotaan KPU. Strategi ini tidak menutup kemungkinan dapat juga diterapkan pada lembaga-lembaga politik lainnya sehingga ketimpangan gender dapat teratasi, tidak lagi seperti sebelumnya.

Di bidang publik, aktivitas perempuan selain dapat diamati melalui peran serta aktifnya di bidang politik juga dapat diamati di bidang pemerintahan sebagaimana akan dipaparkan dalam beberapa aspek berikut ini.

7.6 Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan

Konstitusi tidak membedakan hak-hak setiap warga negara baik hak-hak laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, dan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai peraturan yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan menjadi semakin kelihatan di sektor publik, kini perempuan menikmati pendidikan yang sama dengan laki-laki dan juga merupakan bagian yang cukup penting di bidang ketenagakerjaan. Perempuan yang bekerja di sektor publik hampir menyentuh setengahnya, dan bahkan sekarang jumlah perempuan yang duduk di parlemen justru lebih banyak dari laki-laki mana kala dibandingkan dari periode-periode sebelumnya, ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mampu meningkatkan sumber daya pribadinya.

Perempuan, walaupun mampu bersaing di parlemen, namun faktanya ketimpangan gender masih tetap ada hampir di semua lembaga, baik yang terkait dengan kegiatan politik maupun di dalam lembaga pemerintahan. Ketimpangan gender tersebut dapat dilihat pada tabel 7.5 dan 7.6 yang menyajikan komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun 2017. Secara keseluruhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Denpasar berjumlah 6.031 orang. Dari jumlah tersebut, dimana pegawai negeri sipil laki-laki berjumlah 2.567 orang dan pegawai negeri sipil perempuan berjumlah 3.464 orang. Pegawai negeri ini tersebar di berbagai lembaga, namun yang terbanyak (59,01%) adalah sebagai karyawan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Denpasar. Selebihnya adalah sebagai guru dari tingkat TK sampai SMP. Kesenjangan gender yang sangat menonjol terjadi pada guru TK dimana laki-laki yang menjadi guru TK hanya satu orang dari 97 guru TK yang ada di Kota Denpasar. Kondisi ini terjadi tentu karena masih adanya anggapan bahwa yang pantas

menjadi guru TK adalah perempuan karena identik dengan pengasuhan anak-anak yang secara ideology menjadi ranahnya perempuan. Demikian juga di sekolah dasar keberadaan guru perempuan jauh lebih banyak dibandingkan guru laki-laki.

Tabel. 7.4 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan unit Kerja di Kota Denpasar, 2017

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jlh.	%
		L	P		
1.	SKPD Pemerintah Kota Denpasar	1.802	1.757	3.559	59,01
2.	Taman Kanak-Kanak	1	96	97	1.61
3.	Sekolah Dasar	561	1.234	1.795	29.76
4.	Sekolah Menengah Pertama	203	377	580	9.62
	Jumlah	2.567	3.464	6.031	100,00

Sumber: Kantor BKD Kota Denpasar, 2018.

Apabila dirinci berdasarkan kepangkatannya, tampaknya kepangkatan hanya pada golongan I dan II jumlah pegawai negeri sipil perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil laki-laki. Sementara pada golongan kepangkatan yakni golongan III, dan golongan IV, jumlah PNS perempuan justru berbanding terbalik yaitu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki. Secara rinci yaitu pada golongan III, PNS perempuan berjumlah 1.522 orang, sementara PNS laki-laki berjumlah 956 orang. Pada kepangkatan golongan IV, PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki, yaitu PNS perempuan jumlahnya jauh lebih banyak yaitu berjumlah 1.401 orang, sementara PNS laki-laki berjumlah 741 orang. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai pegawai negeri sipil sangat tinggi, namun mereka lebih banyak menduduki posisi atau golongan yang rendah. Untuk lebih terinci komposisi PNS di Kota Denpasar berdasarkan golongan kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 7.5 berikut ini.

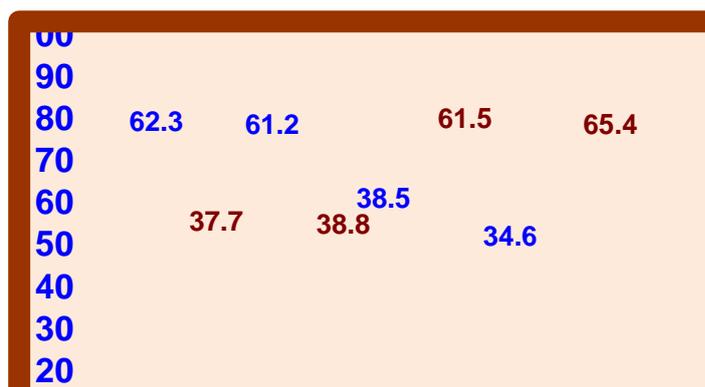
Tabel:7.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017

Gol	2016				2017 (Per 30 September)			
	Jenis Kelamin				Jenis Kelamin			
	L	P	Jlh	%	L	P	Jlh	%
I	124	70	194	2,61	91	55	146	2.42
II	902	647	1.549	20,85	779	486	1.265	20,97
III	1.067	1.627	2.694	36,26	956	1.522	2.478	41,09
IV	1.158	1.835	2.993	40,28	741	1.401	2.142	35,52
Jmh	3.251	4.179	7.430	100,00	2.567	3.464	6.142	100,00

Sumber: Laporan Data Pegawai Kota Denpasar, 2017

Jika dilihat perbandingan jumlah pegawai negeri sipil Kota Denpasar tahun 2016 dan tahun 2017 tampak terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan, hal ini kemungkinan disebabkan karena banyak pegawai yang memasuki masa purna bakti atau pensiun, sementara penerimaan pegawai baru khususnya PNS belum pernah dilakukan. Secara umum perbandingan persentase PNS laki-laki dan perempuan berdasarkan golongan pada tahun 2017 seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar: 7.6 Persentase Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2017



Sumber: BKD Kota Denpasar, 2018

7.7 Pejabat Berdasarkan Eselon

Berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah PNS perempuan jauh lebih tinggi dari pada jumlah PNS laki-laki pada golongan

kepangkatan III dan terutama golongan kepangkatan IV maka secara logika PNS perempuan memiliki peluang lebih banyak untuk menduduki jabatan eselon dibandingkan PNS laki-laki, tetapi realitasnya hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.6 berikut.

Tabel 7.6 Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017

Eselon	2016			%	2017			%
	L	P	Jlh		L	P	Jlh	
II	30	4	34	4,09	25	3	28	3,47
III	127	46	173	20,85	122	50	172	21,29
IV	309	303	612	73,73	293	312	605	74,88
V	6	5	11	1,33	2	1	3	0,37
Jumlah	472	358	830	100,00	442	366	808	100,00

Sumber: Laporan Data Pegawai Kota Denpasar, 2017

Secara keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil di Kota Denpasar yang memiliki jabatan eselon (II s/d V) tahun 2016 sebanyak 830 orang terdiri atas laki-laki 472 orang dan perempuan 358 orang. Pada tahun 2017 jumlah ini mengalami penurunan menjadi 808 orang yang artinya turun sebanyak 22 orang. Hal ini kemungkinan karena sudah banyak yang mengalami masa purna bakti atau pensiun. Yang berkurang cukup banyak adalah eselon II dan eselon V.

Mencermati tabel 7.6, apabila dirinci, tampak bahwa PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon II jumlahnya lebih sedikit dibandingkan PNS laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan lebih sulit untuk mengakses jabatan kepala dinas/badan setaraf eselon II, apakah hal ini karena memang perempuan dianggap tidak mampu atau karena penentu kebijakan kebanyakan laki-laki sehingga mereka selalu mendiskriminasikan perempuan untuk menduduki jabatan kepala OPD. Sementara itu, pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon III, IV dan V jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Disini tampak juga adanya ketidakwajaran karena

sesungguhnya jumlah pegawai perempuan dengan golongan kepangkatan III dan IV jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Oleh karena itu kalau merujuk pada golongan kepangkatan semestinya perempuan yang menduduki jabatan eselon juga paling tidak seimbang dengan laki-laki.

Kondisi ini dengan jelas menggambarkan masih terjadi kesenjangan gender yang sangat menonjol terutama pada jabatan eselon II dan III. Oleh karena itu demi terwujudnya kesetaraan gender di bidang eksekutif maka para penentu kebijakan perlu memperhatikan partisipasi PNS perempuan untuk menduduki jabatan yang strategis seperti halnya eselon II. Selama periode dua tahun terakhir secara umum tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap PNS perempuan khususnya yang menduduki jabatan eselon. Untuk lebih jelasnya, persentase PNS yang menduduki jabatan eselon berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar: 7.7 Persentase Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017



Sumber: BKD Kota Denpasar, 2018

7.8 Yudikatif

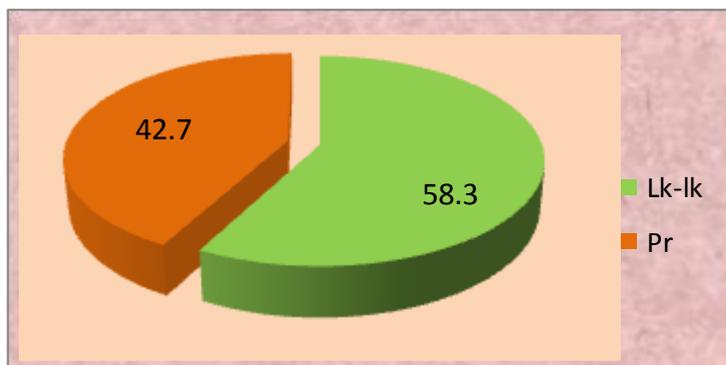
Di era reformasi saat ini yang diwarnai dengan beraneka persoalan hukum seperti korupsi, narkoba, penyelewengan kekuasaan dan lain-lain problem sosial, maka peran penegak hukum menjadi sangat penting. Para penegak hukum ini secara umum dikelompokkan

dalam satu lembaga yang dinamakan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi; jaksa, hakim, pengacara, dan kepolisian. Dalam kaitan lembaga yudikatif, jika diperhatikan kondisi PNS pada bidang-bidang yang terkait dengan penegakan hukum atau bidang yudikatif proporsinya tampak variatif. Secara rinci keberadaan penegak hukum di Kota Denpasar akan diuraikan sebagai berikut:

7.8.1 Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Angka 6 Huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). (<http://penelitihukum.org>). Dengan demikian jelas pada saat ini keberadaan jaksa menjadi sangat penting karena saat ini banyak terjadi kasus-kasus hukum yang harus diselesaikan secara cepat. Terkait dengan keberadaan jaksa di Kota Denpasar tampaknya tidak terlalu menunjukkan kesenjangan gender. Tahun 2017 di Denpasar terdapat 48 jaksa yang terdiri dari 28 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah ini mengalami penambahan jika dibandingkan jumlah pada tahun 2016 yang berjumlah 46 orang. Kalau digambarkan dalam persentase, maka perbandingan jumlah jaksa laki-laki dan perempuan pada tahun 2016 tampak sebagai berikut ini.

Gambar: 7.8 Persentase Jaksa berdasarkan jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017

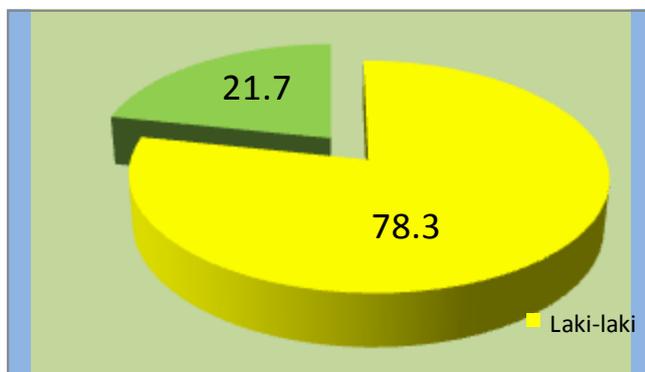


Dari gambar ini tampak bahwa jumlah jaksa laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan untuk menjadi jaksa sudah tidak terlalu terhalang oleh budaya maupun stereotipe yang berkembang di masyarakat. Selain jaksa penegak hukum lainnya adalah hakim. Keberadaan hakim di Kota Denpasar seperti terpapar berikut ini.

7.8.2 Hakim

Di era kekinian dimana semakin maraknya kasus-kasus kejahatan dan kasus lainnya, maka keberadaan hakim menjadi semakin penting. Dalam pengertian yang sederhana **Hakim** dapat diartikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (*Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*) (<http://penelitihukum.org>). Tidak banyak orang yang bisa mengemban profesi ini karena untuk menjadi hakim sangat diperlukan suatu skill terutama dalam berbicara, berargumen, dan yang pasti harus pintar berbicara. Disamping itu mereka yang berprofesi sebagai hakim juga harus bersedia sering mengalami mutasi dari satu daerah ke daerah lain, karena dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus netral, obyektif, dan jujur. Terkait dengan eksistensi hakim di Kota Denpasar berikut disajikan persentase hakim berdasarkan jenis kelamin.

Gambar: 7.9 Persentase Hakim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017.



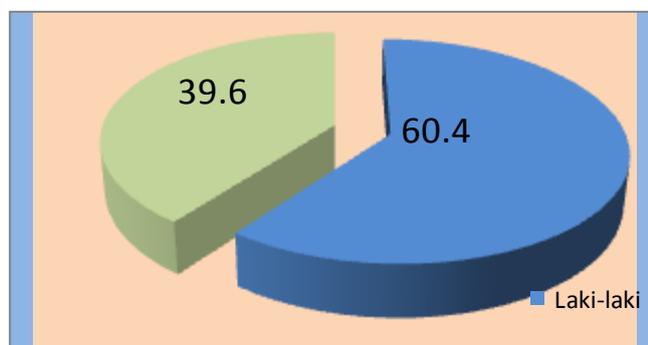
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, 2018

Dari gambar 7.9 menunjukkan bahwa di Kota Denpasar profesi sebagai hakim sebagian besar (78,3%) dilakoni oleh laki-laki. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai persyaratan untuk menjadi seorang hakim yang diantaranya adalah bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, dan bersedia sering dipindah dari satu daerah ke daerah lain. Seorang perempuan kalau harus berpindah-pindah tempat tugas tentu tidak setega dan semudah kaum laki-laki karena seorang perempuan PNS dalam aturan kepegawaian bisa berpindah mengikuti suami, namun tidak ada aturan suami ikut istri. Disinilah aturan itu bersifat bias gender. Oleh karena itu, seorang hakim perempuan kalau dia harus berpindah-pindah tugas harus mempertimbangkan banyak hal seperti ijin suami, ijin anak-anak dan pertimbangan lain-lain.

7.8.3 Notaris

Lebih lanjut pada bidang-bidang yang terkait dengan profesi, keterlibatan perempuan adalah profesi sebagai notaris. Keterlibatan perempuan di bidang ini cukup tinggi walaupun belum menunjukkan kesetaraan gender. Sama halnya dengan profesi yudikatif lainnya, bidang kenotariatan masih lebih banyak ditekuni oleh laki-laki. Dari 111 notaris yang tercatat di ikatan notaris Indonesia, 44 orang (39,6%) perempuan dan 67 orang (60,4%) laki-laki. Eksistensi laki-laki dan perempuan di bidang ini seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar; 7.10 Persentase Notaris menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017.



Sumber: Ikatan Notaris Indonesia Cabang Bali dan Persatuan Advokat Indonesia

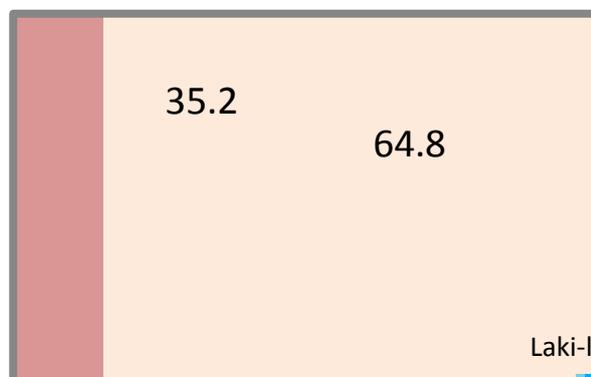
Meskipun bidang ini tidak begitu mudah untuk dimasuki oleh perempuan, tetapi fakta menunjukkan bahwa minat perempuan cukup tinggi untuk memasuki bidang profesi ini, dan dari data di atas menggambarkan bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan untuk menjadi notaris. Selain notaris, bidang Advokat juga banyak ditekuni oleh perempuan. Secara rinci keterlibatan perempuan sebagai advokat akan dibahas berikut ini.

7.8.4 Advokat

Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi advokat di Indonesia memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks ini diartikan sebagai pemacu bagi seorang calon advokat/advokat untuk lebih baik dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Jika dilihat dari definisinya, maka pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain (<http://pengertiandefinisiarti.blogspot.com>).

Di setiap kota besar keberadaan advokat relatif banyak karena kota besar seperti Denpasar biasanya menjadi ranah mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Biasanya di kota-kota besar banyak kasus yang memerlukan keberadaannya. Profesi ini cukup banyak ditekuni oleh kaum perempuan, hal ini tampak dari data yang tercatat dimana jumlah perempuan yang menjadi advokat mencapai 127 orang atau 35,2%, dan laki-laki sebanyak 233 orang (64,8%) seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar: 7.11 Persentase Advokat menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017.



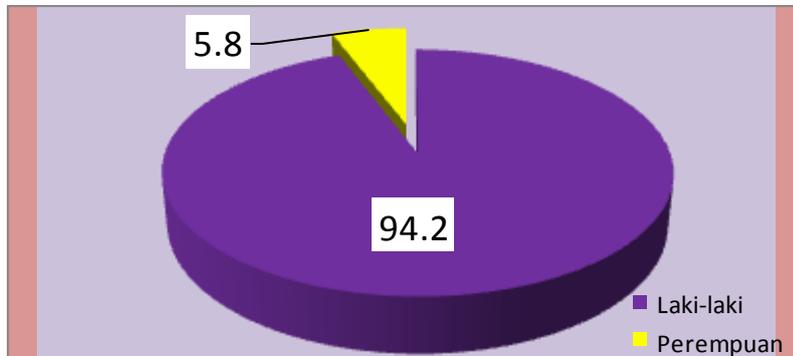
Sumber: Persatuan Pengacara Indonesia Cabang Bali , 2017

Dari gambar di atas tampak sebagian besar pengacara dilakoni oleh laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa di bidang ini masih terjadi ketimpangan gender yang relatif menonjol. Mengapa hal ini terjadi, apakah karena perempuan yang kurang meminati profesi ini atau karena adanya kebijakan yang bias gender. Untuk memperoleh jawaban yang pasti tentu masih memerlukan kajian lebih jauh.

7.8.5 Polisi

Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan pariwisata tampaknya tidak bisa lepas dari persoalan sosial yang dihadapinya, hal ini mengingat dinamika penduduk sangat tinggi. Persoalan kependudukan, kriminal seperti pencurian, narkoba, dan kejahatan lainnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu dalam konteks ini peran polisi menjadi sangat penting. Eksistensi polisi di setiap lapisan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi menjadi sangat penting. Selama ini polisi tampaknya menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan sosial di masyarakat terutama di wilayah perkotaan yang rawan akan kejadian kriminalitas. Oleh karena itu jumlah polisi yang tercatat di Polresta Denpasar relatif banyak yakni mencapai 1.905 personil yang terdiri dari 1795 polisi laki-laki dan 110 polisi perempuan (Polwan). Hal ini seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar: 7.12 Persentase Polisi menurut jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017,

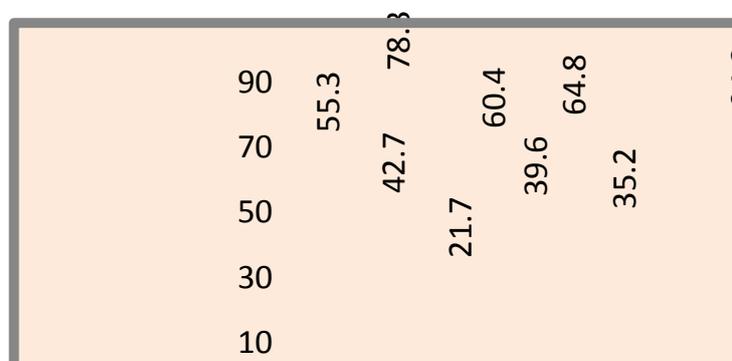


Sumber: Polresta Denpasar, 2018.

Jika gambar di atas dicermati lebih jauh tampak bahwa jumlah polwan jauh lebih kecil dari polisi laki-laki. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena profesi ini kurang diminati oleh perempuan mengingat tugas-tugas polisi identik dengan tugas yang penuh tantangan, berat dan berisiko tinggi. Perempuan yang secara stereotip gender dianggap sebagai lemah lembut dan perlu dilindungi dianggap kurang pantas menekuni profesi ini. Namun demikian tidak berarti perempuan harus tunduk dan menyerah pada stereotip itu, buktinya cukup banyak perempuan yang mampu dan mau berperan sebagai polisi yang selama ini dianggap sebagai ranahnya laki-laki.

Jika dilihat secara umum perbandingan partisipasi laki-laki dan perempuan di bidang yudikatif akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 7.13 Persentase Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017.



Sumber: Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, PPI, 2018

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa hampir di setiap profesi penegak hukum masih terjadi ketimpangan gender, dimana partisipasi perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Kondisi ini memerlukan perhatian bagi penentu kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang ini.

BAB VIII LAIN-LAIN

Bab delapan ini ditampilkan untuk melengkapi data dari beberapa indikator yang belum diuraikan pada bab-bab di atas namun sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran tentang Profil Statistik Gender Kota Denpasar secara komprehensif. Beberapa hal tersebut mencakup antara lain: pelaku kekerasan, gepeng dan akte kelahiran, dan penyandang cacat. Indikator ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan

Sebenarnya masalah kekerasan sudah ada sejak dahulu dan persisnya tidak ada sumber yang pasti, namun sekarang kekerasan menjadi isu hangat dan menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Begitu pentingnya masalah kekerasan sampai pemerintah mengaturnya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa kekerasan dapat digolongkan ke dalam empat bentuk yaitu fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat berakibat penderitaan atau sakit (fisik, psikis, seksual dan ekonomi) pada orang lain. Dalam batas-batas tertentu kekerasan terhadap binatang dapat dikategorikan sebagai kekerasan tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial masyarakat terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk berperilaku merusak. Merusak dapat dilakukan terhadap manusia dan benda, dari dua obyek itu kekerasan terhadap manusia yang paling patal karena dapat terkait pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu kekerasan

sembarang, yang tercakup dalam skala kecil atau kekerasan yang tidak direncanakan dan kekerasan yang dilakukan secara terkoordinir, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang yakni kekerasan antar masyarakat atau antar negara dan terorisme dan lain sebagainya.

Suatu kejadian pasti ada penyebabnya atau latar belakangnya. Demikian juga dalam kekerasan, kekerasan bisa terjadi sudah tentu ada latar belakangnya. Kekerasan yang ditekankan disini adalah kekerasan yang berbasis pada ketimpangan gender yaitu kekerasan yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan jenis kelamin. Korban kekerasan berbasis gender pada umumnya terjadi pada perempuan. Secara umum kekerasan terhadap perempuan dapat dikelaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan pada perempuan secara fisik maupun non fisik (psikis) baik yang terjadi di tempat umum maupun yang terjadi dalam lingkungan pribadi dan rumah tangga. Kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Pelaku dalam melakukan tindakan tersebut dapat menggunakan tangan, kaki dan atau mulut (menggigit) serta bisa pakai benda, bahkan tindak kekerasan yang dilakukan benda dapat berakibat lebih fatal. Sementara yang dimaksud tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang dilakukan untuk merendahkan atau melecehkan kepercayaan diri seseorang, yang dalam hal ini adalah perempuan dengan mengucapkan kata-kata kasar atau perkataan yang tidak menyenangkan orang lain (korban), sedangkan kekerasan psikologis adalah tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban, sehingga secara kejiwaan, korban menjadi tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Dalam kondisi demikian korban menjadi penurut, dan pada akhirnya menjadi bergantung pada orang lain (misalnya istri bergantung pada suami) dalam segala hal terutama pada masalah keuangan.

Berdasarkan data tahun 2017, pada umumnya yang menjadi korban dalam berbagai kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar adalah

perempuan. Namun demikian bukan berarti tidak ada korban laki-laki, hanya saja korban laki-laki lebih sedikit. Pada intinya korban kekerasan mayoritas dialami oleh perempuan. Data kekerasan di Kota Denpasar dapat dilihat dalam Tabel 8.1. berikut ini.

Tabel: 8.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017

Bentuk kekerasan	2016			2017		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P
Fisik	1	12	13	5	7	12
Psikis	3	12	15	0	20	20
Seksual	1	19	20	4	5	9
Penelantaran	1	15	16	1	11	12
Pencuarian	19	0	19	-	-	-
Perdagangan Orang	0	0	0	0	0	0
Eksplorasi	0	0	0	14	2	16
Lainnya	17	22	39	9	12	21
T o t a l	42	80	122	33	57	90

Sumber:P2TP2A Kota Denpasar, 2017

Mencermati tabel 8.1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa laporan jumlah kasus kekerasan di Kota Denpasar pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Ini adalah jumlah kasus yang dilaporkan di P2TP2A Kota Denpasar. Kemungkinan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena kasus kekerasan diibaratkan seperti fenomena gunung es yang kelihatannya kecil dipermukaan. Secara umum korban kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017. Jika dilihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, namun kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis.

Secara konseptual, kekerasan dalam berbagai bentuknya merupakan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dominasi. Kekerasan adalah penyalahgunaan kekuasaan-ketika kekuasaan yang dimiliki seseorang dipakai untuk memaksa atau membohongi orang lain dan berdampak pada

pelanggaran integritas dan kepercayaan orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dimungkinkan oleh adanya ketidaksetaraan status antar-individu, antar-kelompok, atau antar-negara (Sadli, 2002). Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang sangat patriarkhis, maka perempuan dan anak-anak yang nota bene berposisi subordinat lebih banyak yang menjadi korban kekerasan. Jika dilihat ciri-ciri dari pelaku dan korban kekerasan yang terjadi di Denpasar seperti tampak pada tabel berikut ini.

Tabel. 8.2 Ciri – Ciri dan Pelaku Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar. 2016 dan 2017

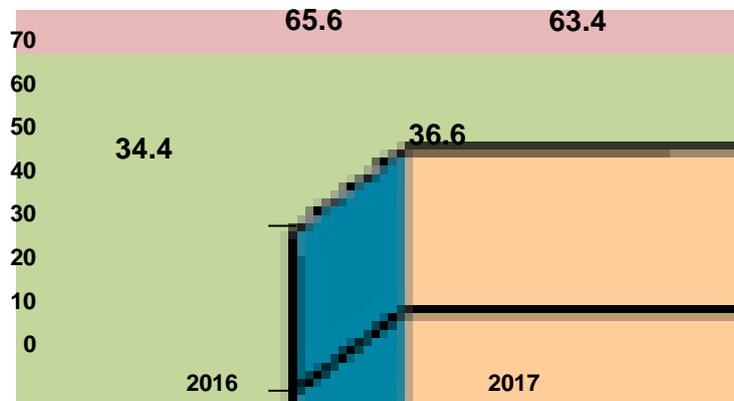
Usia	2016						2017					
	Ciri - Ciri Pelaku			Ciri-Ciri Korban			Ciri - Ciri Pelaku			Ciri-Ciri Korban		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
0 – 17 Th	34	2	36	9	38	47	37	2	39	39	14	53
18 – 24 Th	7	0	7	1	4	5	0	0	0	0	0	0
25 – 59 Th	49	12	61	0	26	26	38	5	43	1	35	36
60 +	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	6

Sumber:P2TP2A Kota Denpasar, 2017

Dari Tabel 8.2 di atas tampak bahwa pelaku kekerasan kebanyakan laki-laki yang berumur 25-59 tahun, dengan umur yang demikian ini diperkirakan mereka ini sudah menikah. Pelaku yang berumur 0-17 tahun juga cukup banyak, mereka ini kemungkinan melakukan kekerasan antar remaja. Sementara itu cirri-ciri korbannya sebagian besar adalah perempuan, kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2017.

Jika ditampilkan dalam bentuk persentase, maka perbandingan korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin akan tampak seperti pada gambar berikut.

Gambar: 8.1 Persentase Korban kekerasan menurut Jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016 dan 2017



Sumber: Polresta dan BP3A Provinsi Bali. Tahun 2012

8.2. Gelandangan dan pengemis (Gepeng)

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu fenomena sosial terutama di perkotaan yang belum pernah bisa diatasi secara tuntas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya seperti penangkapan namun mereka ini tidak pernah jera. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya, akhirnya mereka akan kembali lagi gentayangan di tempat-tempat yang dianggapnya strategis untuk menengadahkan tangan seperti di traffick light, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Instansi yang berkompeten dalam menangani gepeng seperti Dinas Sosial dan Tenaga kerja, Satpol PP sepertinya sudah kehabisan akal untuk memberantas para gepeng. Pada musim-musim tertentu seperti menjelang hari raya keberadaan gepeng semakin banyak jumlahnya, karena pada saat-saat seperti ini dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan untuk kepentingan hari raya.

Setiap orang ingin hidup layak, sejahtera, aman dan lain-lainnya, tetapi kenyataannya tidak semua orang dapat hidup layak. Oleh karena itu banyak warga yang hidup dari menggepeng (gelandangan dan pengemis). Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak layak atau tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup berpindah-pindah ditempat-tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta baik yang dilakukan ditempat-tempat umum maupun di rumah-rumah penduduk dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain. Oleh karena itu pengemis tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tinggalnya berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya misalnya di emper-emper pertokoan, stasiun kereta api, terminal atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk menjalani kehidupannya.

Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri yang menyebabkan banyak orang datang (urbanisasi) ke kota ini dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan peluang berusaha di Kota Denpasar tidak mampu menampung para urban karena tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan. Dengan tidak memiliki ketrampilan, dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya gelandang dan pengemis dari para urban tersebut.

Sebenarnya Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya secara maksimal untuk menangani gependang tersebut yakni dengan penjaringan gependang yang berkeliaran di seputaran kota. Berdasarkan fakta dari Dinas Transmigrasi, Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Denpasar pada tahun 2012 gependang yang terjaring sebanyak 289 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 orang laki-laki (36,33 %) dan sebanyak 184 orang perempuan (63,67 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 8.3 berikut.

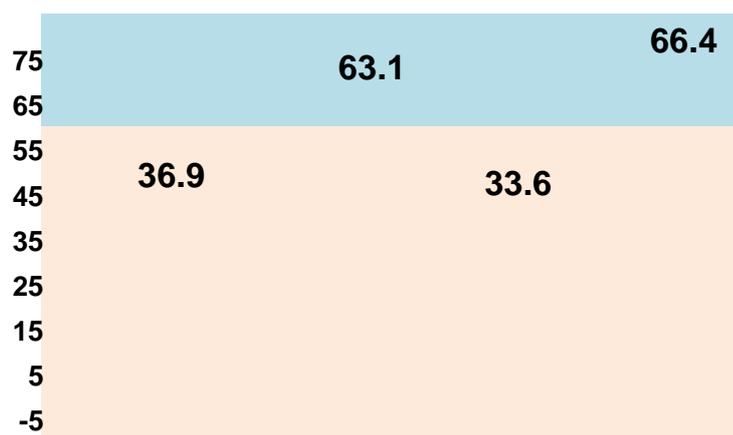
Tabel .8.3 Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Telah di Bina dan di Pulangkan di Kota Denpasar, Tahun 2016 dan 2017

Kelompok Umur (tahun)	2016			2017		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh
0 - 4 tahun	7	7	14	3	0	3
5 - 9 tahun	2	5	7	2	0	2
10 - 14 tahun	2	6	8	0	0	0
15 - 18 tahun	-	1	1	2	0	2
19 tahun ke atas	41	70	111	31	75	106
Jumlah	52	89	141	38	75	113

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2018

Tabel 8.3 di atas menggambarkan bahwa jumlah gepeng yang terjaring di Kota Denpasar sebagian besar berusia 19 tahun ke atas dan usia 0- 9 tahun baik untuk tahun 2016 maupun 2017. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa mereka yang sebagian besar kaum perempuan ibu rumah tangga melakukan aksinya dengan membawa anak sebagai modal sosial untuk meraih modal ekonomi, artinya anak-anak dipakai untuk menarik belas kasihan orang lain. Pada tahun 2017 tampak terjadi penurunan jumlah gepeng yang terjaring, ini artinya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait sudah berhasil mengurangi keberadaan gepeng di Denpasar. Jika dilihat secara persentase, maka keberadaan gepeng menurut jenis kelamin seperti tampak pada gambar 8.2 berikut.

Gambar: 8.2 Persentase Gepeng menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2016 dan 2017



Gepeng yang telah terjaring biasanya ditampung pada salah satu penampungan yang ada di jalan Prof. I.B Mantra, dan selanjutnya mereka diberi pembinaan oleh berbagai pihak seperti dari kepolisian, dan dari unsur agama. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan atau perilaku menggepeng merupakan perilaku yang kurang terpuji. Jika mereka ini sudah menyadari perbuatan mereka tidak baik diharapkan agar mereka tidak balik lagi menggepeng. Selanjutnya jika sudah diberikan pembinaan maka mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Selama tahun 2017 Kantor Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Denpasar telah melakukan pembinaan terhadap 113 gepeng. Ini artinya semua gepeng yang terjaring sudah mendapatkan pembinaan.

Masalah gelandangan dan pengemis sebagai masalah sosial merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya keterampilan (*skill*) kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sebagai faktor atau penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota

Denpasar. Untuk itu diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam mencegah eksistensi gepeng antara lain masyarakat diharapkan tidak memberikan uang kepada gepeng. Dengan tidak adanya yang memberikan uang maka mereka akan kapok untuk melakukan aktivitas mengemis.

8.3 Penduduk Lanjut Usia (Lansia).

Lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi .. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian masa tua :

Menurut Hurlock (2002), tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia enampuluh sampai tujuh puluh tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia tujuh puluh tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orangtua muda atau usia tua (usia 65 hingga 74 tahun) dan orangtua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih) (Baltes, Smith&Staudinger, Charness&Bosmann) dan orang tua lanjut (85 tahun atau lebih) dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda (Johnson&Perlin).

- Menurut J.W. Santrock (J.W.Santrock, 2002, h.190), ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang barat dan orang Indonesia. Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun keatas, dimana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan.

- Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia (<http://chirpstory.com/li/79452>).

Dalam tulisan ini yang digolongkan lansia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Jumlah lansia yang ada di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 8.4 berikut ini.

Tabel .8.4 Jumlah Lansia menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	1.472	1.786	3.255
2	Denpasar Timur	1.792	1.754	3.546
3	Denpasar Selatan	1.517	1.842	3.359
4	Denpasar Barat	2.658	2.553	5.211
	Jumlah	7.439	7.935	15.371

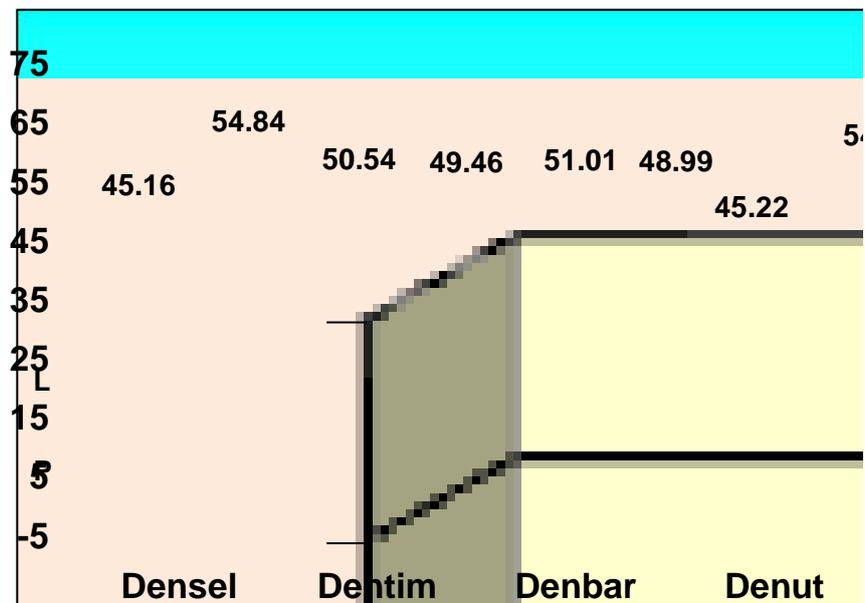
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2018

Dari Tabel 8.4 di atas tampak bahwa jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah lansia laki-laki. Hal ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki.

Penduduk yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau lanjut usia secara fisik sudah rentan terhadap berbagai penyakit baik fisik maupun psikis, oleh karena itu pada usia-usia ini sangat diperlukan adanya perhatian serius terhadap kesehatan tubuh. Disamping itu pada usia-usia ini jika tidak mempunyai aktivitas kadangkala penduduk lansia akan mengalami stres atau depresi karena mereka selalu merasa tergantung pada orang lain. Terkait dengan persoalan ini maka saat ini pemerintah Kota Denpasar tidak hanya menaruh perhatian besar terhadap persoalan anak-anak, namun perhatian khusus juga diberikan pada penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini tampak dari berbagai program yang telah diluncurkan untuk mepentingkan kesejahteraan lansia. Program yang telah diluncurkan untuk lansia seperti senam sehat lewat program Posyandu Paripurna, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Untuk memacu semangat hidup, menghindari stress dan menjaga kesehatan para lansia di Kota Denpasar, tim penggerak PKK Kota juga seringkali melakukan lomba berbagai kegiatan seperti nari pendet, lomba joged, senam lansia dan mengajak penduduk lanjut usia refresing dengan mengajak mereka sembahyang mengunjungi pura-pura tertentu (*metirta yatra*) di berbagai tempat seperti ke pura Tirta Empul dan Pura-pura lainnya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, presentase lansia akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 8.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2017



Sumber: Dinas PPPAPKB Kota Denpasar, 2018.

Dari gambar di atas tampak dengan jelas bahwa di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara persentase jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah lansia laki-laki, sementara untuk Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Barat jumlahnya hampir seimbang.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Simpulan

Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas tampaknya masih ada beberapa isu gender yang perlu mendapat penanganan serius. Secara umum dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, masih terjadi kesenjangan gender pada beberapa indikator pendidikan seperti pada angka partisipasi murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kesenjangan gender pada APM dan APK terutama lebih tampak menonjol pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Sedangkan untuk di tingkat SD hampir tidak tampak kesenjangannya.

Kedua, di bidang kesehatan, tampak pemberian ASI eksklusif sudah mencapai persentase yang relatif tinggi yakni telah mencapai angka 95,3%.. Keberadaan dokter baik dokter umum maupun dokter gigi didominasi oleh kaum perempuan, sedangkan dokter spesialis didominasi oleh laki-laki. Masih ada balita yang berstatus gizi buruk namun jumlahnya hanya 5 orang.

Ketiga, kesenjangan gender di bidang ekonomi tampak pada pekerjaan sebagai petugas parkir, petugas kebersihan, petugas pertamanan, pegawai fitness dan karyawan hotel didominasi oleh laki-laki. Sementara pekerja salon, rumah makan dan restoran didominasi oleh perempuan.

Keempat, di sektor publik terutama di bidang politik, kesenjangan gender tampak masih sangat menjolok, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Di legislatif tampak dari keanggotaan DPRD yang didominasi oleh laki-laki. Di eksekutif tampak dari jumlah PNS terutama dalam eselonisasi masih terjadi kesenjangan yang sangat

menjolok. Di kelompok yudikatif, kesenjangan tampak pada keberadaan jaksa, hakim, notaris dan advokat yang masih didominasi oleh laki-laki.

Kelima, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya masih menysasar kaum perempuan, demikian juga persoalan gepeng sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Para gepeng yang berkeliaran di Kota Denpasar sebagian besar adalah perempuan ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

9.2 Rekomendasi

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kota Denpasar, dapat disarankan sebagai berikut.

- (1) Ketimpangan gender yang terjadi pada beragam aspek dan jenjang pendidikan, perlu mendapat perhatian secara lebih intensif dari semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang ketimpangan gender paling tidak dapat diminimalkan.
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, penting dilakukan pendidikan politik bagi kaum perempuan, baik melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun partai politik yang ada di Kota Denpasar.
- (3) Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, maka pelatihan penyusunan perencanaan yang responsive gender (PPRG) dan penganggaran yang responsive gender (ARG) perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh OPD yang berkopeten.
- (4) Penyusunan statistik dan analisis gender perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga isu-isu gender yang ada bisa diidentifikasi. Selanjutnya isu yang muncul diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara berkesinambungan sehingga kesetaraan gender bisa terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmadja, Nengah Bawa, Astiti, TIP,, Arjani, Ni Luh dan Sudarta, Wayan, 2009. *Gender dalam Perspektif Budaya Bali*. Denpasar: Swasta Nulus
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: Bappeda.
- Bachtiar, Harsja W. 1977. "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian" dalam *Koentjaraningrat (ed.). Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bhasin, K. 1996. *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Nug Kantjasungkana, penterjemah). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Eja Yuarsi, Susi. 1997. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender" dalam Irwan Abdullah (ed.). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. 1966. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya" paper disampaikan pada diskusi Gender Suatu Tinjauan Multidimensi. Yogyakarta. 29 April.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Surya Dharma (ed.). Malang: UMM Press.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. "Panduan dan Bunga Rampai Pembelajaran Pengarusutamaan Gender". Jakarta: KPP, BKKBN dan UNFPA.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45 / 481 / HK / 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam siklus pembangunan daerah mutlak menggunakan data baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk forum yang mengakomodir kebutuhan pentingnya data sebagai pijakan dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Data Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Data Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

Tugas :

1. menyusun rencana kerja;
2. meningkatkan kerjasama lintas sektor ;
3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan;
4. menjamin kesinambungan dan ketersediaan data yang bersumber dari berbagai sektor;
5. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor;
6. melakukan review kegiatan forum data di tingkat Kota.

Fungsi :

1. sebagai forum komunikasi dan media dialog seluruh anggota forum;
2. merupakan jembatan untuk mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi;
3. media diseminasi data dan informasi;
4. merupakan forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Maret 2018

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar,

Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1960505 198603 2 025

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 1 MARET 2018
NOMOR : 188.45 / 481 / HK / 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DATA KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA KOTA DENPASAR

Penasehat : Walikota Denpasar

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Denpasar.
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar.
4. Kepala Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.
6. Ketua PHDI Kota Denpasar.
7. Ketua KPU Kota Denpasar.
8. Ketua Organisasi Sosial se- Kota Denpasar.
9. Ketua Organisasi Perempuan se - Kota
Denpasar.
10. Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Kota
Denpasar.
11. Ketua Forum Anak Kota Denpasar.
12. Ketua Majelis Madya Kota Denpasar.
13. Forum OSIS SMP dan SMA se-Kota Denpasar.
14. Camat se - Kota Denpasar.
15. Kepala Desa / Lurah se - Kota Denpasar.
16. Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Denpasar

Staf Administrasi : Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar sebanyak 11
(sebelas) orang

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Maret 2018

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar,

Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1960505 198603 2 025